

**RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER
(RPS)**



MATA KULIAH	:	Studi Parlemen
KODE MK	:	3PBIP416
SEMESTER	:	4

Tim Penyusun:

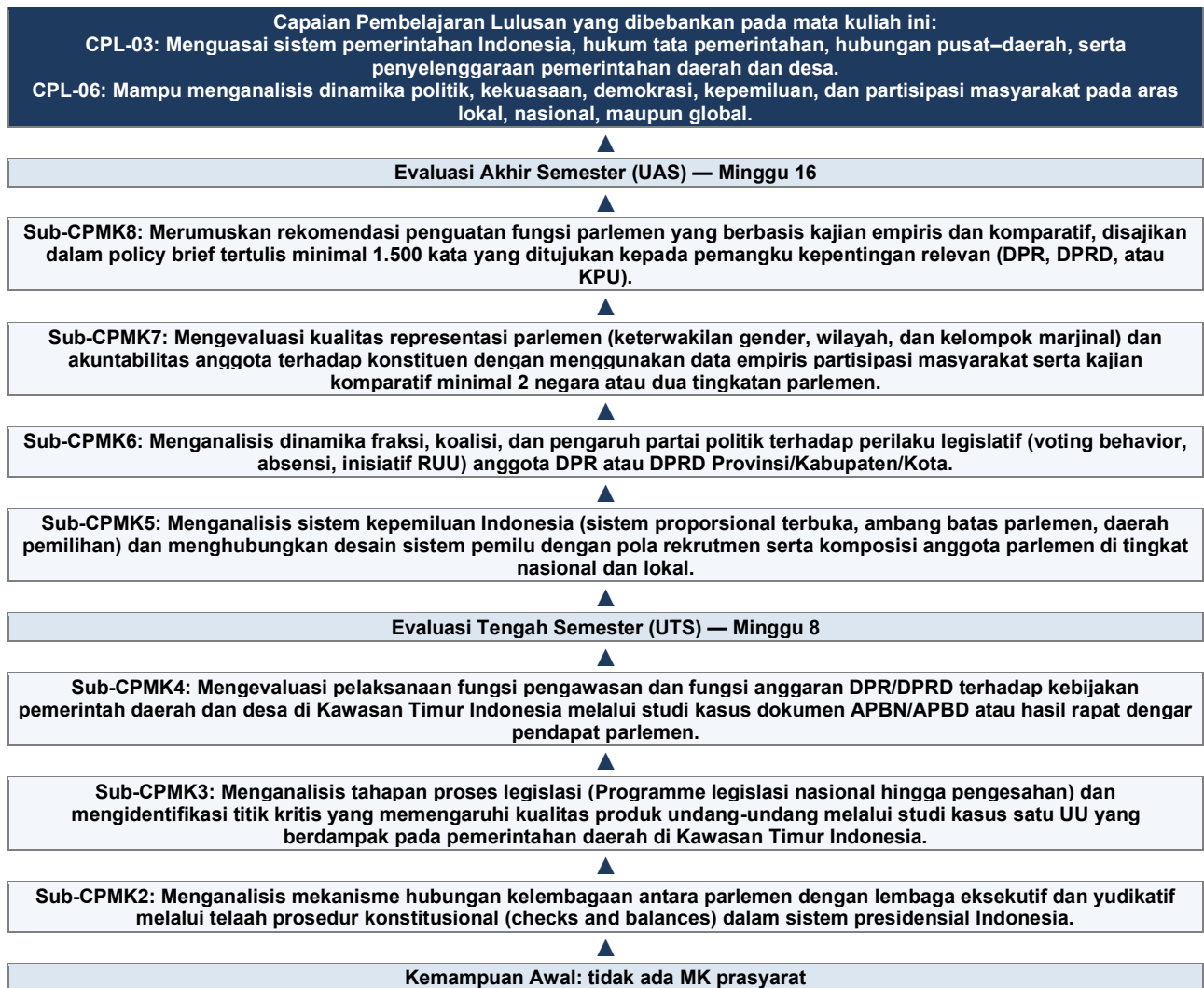
Swastiani Dunggio, S.IP., M.Si.

(Program Studi Ilmu Pemerintahan — Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Ichsan Gorontalo)

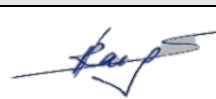
**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN (S1)
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO
2023**

1. Analisis Pembelajaran

Diagram berikut menggambarkan keterkaitan konstruktif (constructive alignment) dari kemampuan awal, melalui Sub-CPMK secara berjenjang dan asesmen (UTS/UAS), hingga pencapaian CPL yang dibebankan pada mata kuliah ini.



2. Rencana Pembelajaran Semester

		UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN S1				Kode Dokumen RPS-3PBIP416		
RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER								
MATA KULIAH (MK)		KODE	Rumpun MK	BOBOT (sks)		SEMESTER	Tgl Penyusunan	
Studi Parlemen		3PBIP416	MKWP	T=3	P=0	4	31 Mei 2025	
OTORISASI		Pengembang RPS	Koordinator RMK		Ketua PRODI			
		 Swastiani Dunggio, S.IP., M.Si. NIDN. 0930048307	 Swastiani Dunggio, S.IP., M.Si. NIDN. 0930048307		 Purwanto, S.IP., M.Si. NIDN. 0926096601			
Capaian Pembelajaran (CP)		CPL-PRODI yang dibebankan pada MK						
		CPL-03	Menguasai sistem pemerintahan Indonesia, hukum tata pemerintahan, hubungan pusat–daerah, serta penyelenggaraan pemerintahan daerah dan desa.					
		CPL-06	Mampu menganalisis dinamika politik, kekuasaan, demokrasi, pemilihan, dan partisipasi masyarakat pada aras lokal, nasional, maupun global.					
		Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)						
		CPMK1	Mahasiswa mampu menjelaskan struktur, fungsi konstitusional, dan kewenangan lembaga parlemen (DPR, DPD, DPRD) dalam sistem ketatanegaraan Indonesia beserta mekanisme hubungan kelembagaannya dengan eksekutif dan yudikatif.					
		CPMK2	Mahasiswa mampu menganalisis dinamika proses legislasi, fungsi pengawasan, dan fungsi anggaran parlemen Indonesia melalui studi kasus produk undang-undang atau kebijakan anggaran yang berdampak pada penyelenggaraan pemerintahan daerah dan desa di Kawasan Timur Indonesia.					
		CPMK3	Mahasiswa mampu menganalisis pola rekrutmen anggota parlemen melalui sistem pemilihan, dinamika fraksi dan koalisi, serta pengaruh partai politik terhadap perilaku legislatif pada aras nasional maupun lokal (DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota).					
		CPMK4	Mahasiswa mampu mengevaluasi kualitas representasi dan akuntabilitas parlemen terhadap konstituen serta merumuskan rekomendasi penguatan fungsi parlemen berbasis kajian komparatif dan data empiris partisipasi masyarakat, yang disajikan dalam bentuk policy brief tertulis minimal 1.500 kata.					
		Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)						

	Sub-CPMK1	Menjelaskan struktur kelembagaan dan dasar konstitusional parlemen Indonesia (DPR, DPD, MPR, DPRD) serta mengklasifikasikan kewenangan masing-masing lembaga berdasarkan UUD NRI 1945 dan peraturan perundang-undangan terkait.			
	Sub-CPMK2	Menganalisis mekanisme hubungan kelembagaan antara parlemen dengan lembaga eksekutif dan yudikatif melalui telaah prosedur konstitusional (checks and balances) dalam sistem presidensial Indonesia.			
	Sub-CPMK3	Menganalisis tahapan proses legislasi (Programme legislasi nasional hingga pengesahan) dan mengidentifikasi titik kritis yang memengaruhi kualitas produk undang-undang melalui studi kasus satu UU yang berdampak pada pemerintahan daerah di Kawasan Timur Indonesia.			
	Sub-CPMK4	Mengevaluasi pelaksanaan fungsi pengawasan dan fungsi anggaran DPR/DPRD terhadap kebijakan pemerintah daerah dan desa di Kawasan Timur Indonesia melalui studi kasus dokumen APBN/APBD atau hasil rapat dengar pendapat parlemen.			
	Sub-CPMK5	Menganalisis sistem pemilihan Indonesia (sistem proporsional terbuka, ambang batas parlemen, daerah pemilihan) dan menghubungkan desain sistem pemilu dengan pola rekrutmen serta komposisi anggota parlemen di tingkat nasional dan lokal.			
	Sub-CPMK6	Menganalisis dinamika fraksi, koalisi, dan pengaruh partai politik terhadap perilaku legislatif (voting behavior, absensi, inisiatif RUU) anggota DPR atau DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota.			
	Sub-CPMK7	Mengevaluasi kualitas representasi parlemen (keterwakilan gender, wilayah, dan kelompok marjinal) dan akuntabilitas anggota terhadap konstituen dengan menggunakan data empiris partisipasi masyarakat serta kajian komparatif minimal 2 negara atau dua tingkatan parlemen.			
	Sub-CPMK8	Merumuskan rekomendasi penguatan fungsi parlemen yang berbasis kajian empiris dan komparatif, disajikan dalam policy brief tertulis minimal 1.500 kata yang ditujukan kepada pemangku kepentingan relevan (DPR, DPRD, atau KPU).			
Korelasi CPMK terhadap Sub-CPMK					
		CPMK1	CPMK2	CPMK3	CPMK4
	Sub-CPMK1	√	—	—	—
	Sub-CPMK2	√	—	—	—
	Sub-CPMK3	—	√	—	—
	Sub-CPMK4	—	√	—	—
	Sub-CPMK5	—	—	√	—
	Sub-CPMK6	—	—	√	—
	Sub-CPMK7	—	—	—	√
	Sub-CPMK8	—	—	—	√
	Jumlah	2	2	2	2
Korelasi CPL terhadap Sub-CPMK					

	<table> <tr> <th></th> <th>CPL-03 (%)</th> <th>CPL-06 (%)</th> <th>Bobot penilaian (%)</th> <th>Jumlah Minggu</th> </tr> <tr> <td>Sub-CPMK1</td> <td>15</td> <td></td> <td>15</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>Sub-CPMK2</td> <td>15</td> <td></td> <td>15</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>Sub-CPMK3</td> <td>7</td> <td>7</td> <td>14</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>Sub-CPMK4</td> <td>4</td> <td>3</td> <td>7</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Sub-CPMK5</td> <td></td> <td>14</td> <td>14</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>Sub-CPMK6</td> <td></td> <td>14</td> <td>14</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>Sub-CPMK7</td> <td>7</td> <td>7</td> <td>14</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>Sub-CPMK8</td> <td>4</td> <td>3</td> <td>7</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td></td> <td>52</td> <td>48</td> <td>100</td> <td>14</td> </tr> </table>		CPL-03 (%)	CPL-06 (%)	Bobot penilaian (%)	Jumlah Minggu	Sub-CPMK1	15		15	2	Sub-CPMK2	15		15	2	Sub-CPMK3	7	7	14	2	Sub-CPMK4	4	3	7	1	Sub-CPMK5		14	14	2	Sub-CPMK6		14	14	2	Sub-CPMK7	7	7	14	2	Sub-CPMK8	4	3	7	1		52	48	100	14
	CPL-03 (%)	CPL-06 (%)	Bobot penilaian (%)	Jumlah Minggu																																															
Sub-CPMK1	15		15	2																																															
Sub-CPMK2	15		15	2																																															
Sub-CPMK3	7	7	14	2																																															
Sub-CPMK4	4	3	7	1																																															
Sub-CPMK5		14	14	2																																															
Sub-CPMK6		14	14	2																																															
Sub-CPMK7	7	7	14	2																																															
Sub-CPMK8	4	3	7	1																																															
	52	48	100	14																																															
Deskripsi Singkat MK	Mata kuliah Studi Parlemen (3 SKS) mengkaji struktur, fungsi, dan kewenangan lembaga perwakilan rakyat Indonesia—DPR, DPD, dan DPRD—dalam kerangka sistem ketatanegaraan berdasarkan UUD NRI 1945 serta peraturan perundang-undangan yang berlaku, sekaligus menelaah dinamika proses legislasi, fungsi pengawasan, dan fungsi anggaran sebagai tiga pilar utama kinerja parlemen. Mata kuliah ini berposisi sebagai mata kuliah analitik-institusional yang mengintegrasikan bahan kajian Hukum, Kelembagaan, dan Birokrasi Pemerintahan (BK-03) dengan Politik, Demokrasi, dan Kepemiluan (BK-08), sehingga menjembatani pemahaman hukum tata negara dengan analisis politik empiris secara koheren. Mahasiswa dilatih menganalisis persoalan representasi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat dalam sistem demokrasi Indonesia—termasuk relasi DPRD dalam hubungan pusat–daerah—dengan penekanan pada kasus-kasus yang relevan bagi kawasan Indonesia Timur sebagai konteks lokal yang kaya dinamika otonomi daerah. Pembelajaran diselenggarakan melalui pendekatan berbasis kasus dan proyek (Case-Based Learning dan Project-Based Learning) yang mendorong mahasiswa mengevaluasi kebijakan parlemen secara kritis, bertanggung jawab, dan berintegritas, sejalan dengan nilai-nilai ICHSA-N khususnya integritas dan pengabdian terhadap kepentingan publik. Capaian akhir mata kuliah ini adalah kemampuan mahasiswa menyajikan laporan analisis tertulis yang mengevaluasi kualitas kinerja parlemen berdasarkan data empiris, sehingga berkontribusi langsung pada pemenuhan CPL-03 dan CPL-06.																																																		
Bahan Kajian: Materi Pembelajaran	1. Konsep dasar parlemen & demokrasi; 2. Sejarah parlemen Indonesia; 3. Struktur & kewenangan DPR, DPD, DPRD; 4. Fungsi legislasi parlemen; 5. Fungsi pengawasan & anggaran; 6. Relasi parlemen dengan eksekutif-yudikatif; 7. Proses pembentukan undang-undang; 8. Representasi & akuntabilitas parlemen; 9. Partisipasi masyarakat dalam legislasi; 10. Parlemen & hubungan pusat-daerah;																																																		

	11. DPRD dalam tata kelola daerah; 12. Studi kasus kebijakan kawasan Indonesia Timur.						
Pustaka	Utama :						
	(1) Norton, P. (2013). Parliament in British Politics. 2nd Edition. Palgrave Macmillan; (2) Lijphart, A. (1999). Patterns of Democracy: Government Forms and Performance in Thirty-Six Countries. Yale University Press; (3) Asshiddiqie, J. (2006). Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara. Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI; (4) Budiardjo, M. (2008). Dasar-Dasar Ilmu Politik. Edisi Revisi. PT Gramedia Pustaka Utama; (5) Hazan, R. Y., & Rahat, G. (2010). Democracy within Parties: Candidate Selection Methods and Their Political Consequences. Oxford University Press; (6) Putnam, R. D. (1993). Making Democracy Work: Civic Traditions in Modern Italy. Princeton University Press.						
	Pendukung :						
	(1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019; (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022; (3) Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia; (4) Farida, M. (2021). Fungsi Pengawasan DPRD terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah: Studi pada Daerah Otonom di Kawasan Indonesia Timur. Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Politik Lokal, 3(2), 88-107; (5) Asshiddiqie, J. (2010). Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi. Sinar Grafika.						
Dosen Pengampu	Swastiani Dunggio, S.IP., M.Si.						
Modalitas dan Matakuliah prasyarat	Modalitas: - Mata kuliah prasyarat: -						
Mg Ke-	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)	Penilaian		Bantuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, [Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk	Luring (offline)	Daring (online)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1,2	Sub-CPMK1: Menjelaskan struktur kelembagaan dan dasar konstitusional parlemen Indonesia (DPR, DPD, MPR, DPRD) serta mengklasifikasikan	Mahasiswa mampu: Menjelaskan pengertian parlemen dan fungsi pokoknya dalam sistem	Bentuk Penilaian Tes/Unjuk Kerja: Kuis identifikasi: mahasiswa	BP — Mekanisme kuliah: Dosen memandu diskusi kelas tentang peta konsep yang telah diunggah mahasiswa; menyajikan	BP — Mekanisme kuliah: Dosen mengunggah video pengantar (15-20 menit) berisi paparan konsep parlemen,	Bahan Kajian: Konsep dasar parlemen dan fungsi perwakilan dalam demokrasi;	15

Mg Ke-	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)	Penilaian		Bentuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, [Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk	Luring (<i>offline</i>)	Daring (<i>online</i>)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	kewenangan masing-masing lembaga berdasarkan UUD NRI 1945 dan peraturan perundang-undangan terkait.	demokrasi perwakilan dengan menggunakan minimal tiga referensi dari pustaka wajib • Mengidentifikasi perbedaan sistem parlemen unikameral, bikameral, dan trikameral berdasarkan karakteristik strukturalnya • Mengklasifikasikan lembaga DPR, DPD, MPR, dan DPRD ke dalam kerangka kelembagaan ketatanegaraan Indonesia berdasarkan UUD NRI 1945 • Menghubungkan dasar konstitusional pembentukan lembaga perwakilan dengan prinsip kedaulatan rakyat dalam sistem demokrasi Indonesia	mengklasifikasikan karakteristik lembaga perwakilan (DPR, DPD, MPR, DPRD) berdasarkan pasal-pasal UUD NRI 1945 yang relevan; dinilai berdasarkan ketepatan pemetaan konstitusional dan kelengkapan argumen Partisipasi kelas & laboratorium: Keaktifan bertanya dan merespons dalam diskusi pembuka tentang konsep demokrasi perwakilan; dinilai berdasarkan relevansi pertanyaan, kesediaan	perbandingan singkat antara model parlemen Westminster (Inggris) dan model Indonesia dengan menekankan kekhasan sistem bikameral-plus Indonesia pascareformasi (tatap muka di kelas). Mekanisme & materi: Mahasiswa mendiskusikan peta konsep masing-masing dalam kelompok kecil (3-4 orang), mengkritisi dan melengkapi klasifikasi kewenangan tiap lembaga berdasarkan pasal UUD NRI 1945, kemudian mempresentasikan hasil diskusi kelompok secara lisan di depan kelas MP — Metode Pembelajaran: Case-Based Learning: kelompok menganalisis struktur lembaga perwakilan pada satu negara demokrasi	demokrasi perwakilan, dan posisi konstitusional lembaga-lembaga parlemen Indonesia ke LMS UNISAN; menyertakan panduan baca selektif dari Norton (2013) Bab 1 dan Budiardjo (2008) Bab tentang demokrasi (via LMS; sinkron/asinkron). Mekanisme & materi: Mahasiswa menelaah video pengantar, membaca bab yang ditunjuk, menelusuri dokumen UUD NRI 1945 dan UU No. 17 Tahun 2014 melalui JDIH Nasional, kemudian mengunggah peta konsep awal ke forum diskusi LMS sebelum sesi luring MP — Metode Pembelajaran: Case-Based Learning: mahasiswa	• Tipologi sistem perwakilan: unikameral, bikameral, dan trikameral; • Dasar konstitusional DPR, DPD, MPR, dan DPRD dalam UUD NRI 1945; • Prinsip kedaulatan rakyat dan sistem demokrasi Indonesia; Pustaka: Norton (2013); Lijphart (1999); Budiardjo (2008); Asshiddiqie (2006); Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019.	

Mg Ke-	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)	Penilaian		Bentuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, [Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk	Luring (<i>offline</i>)	Daring (<i>online</i>)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			mendengarkan perspektif berbeda, dan kejujuran dalam menyampaikan gagasan awal (nilai Integrity ICHSA-N) Tugas: Peta konsep tertulis (1-2 halaman A4) yang memetakan empat lembaga perwakilan Indonesia beserta dasar konstitusionalnya; dikumpulkan via LMS e-learning.unisan.ac.id	(Indonesia vs Inggris) menggunakan kerangka Lijphart (1999) tentang pola demokrasi, lalu menarik implikasi bagi konteks ketatanegaraan Indonesia Estimasi Waktu: PB 3×50' · PT 3×60' · KM 3×60'. Tugas: Mahasiswa menyusun peta konsep tertulis yang memetakan empat lembaga perwakilan Indonesia (DPR, DPD, MPR, DPRD) beserta dasar konstitusional, fungsi pokok, dan kewenangan utama masing-masing berdasarkan UUD NRI 1945 dan UU No. 17 Tahun 2014; peta konsep disertai paragraf pengantar yang menjelaskan mengapa pemahaman struktur kelembagaan ini penting bagi penguatan demokrasi Indonesia (nilai Nationalism ICHSA-N); penggunaan Generative AI	mengidentifikasi satu kasus nyata di mana keempat lembaga perwakilan berperan berbeda (misalnya proses pengesahan undang-undang strategis), lalu menuliskan analisis singkat perbedaan peran kelembagaannya sebagai bahan diskusi Estimasi Waktu: PB 3×50' · PT 3×60' · KM 3×60'.		

Mg Ke-	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)	Penilaian		Bentuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, [Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk	Luring (<i>offline</i>)	Daring (<i>online</i>)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				wajib dideklarasikan secara transparan jika digunakan Deliverable: Peta konsep tertulis 1-2 halaman A4 dalam format dokumen Word atau PDF, diunggah ke LMS UNISAN paling lambat sebelum pertemuan Minggu 2			
			Bentuk Penilaian Tes/Unjuk Kerja: Tes pemetaan pasal: mahasiswa mencocokkan kewenangan spesifik masing-masing lembaga (DPR, DPD, MPR, DPRD) dengan pasal-pasal UUD NRI 1945 dan UU No. 17 Tahun 2014 yang relevan; dinilai berdasarkan ketepatan pasal,	BP — Mekanisme kuliah: Dosen memandu sesi validasi tabel komparasi: tiap kelompok mempresentasikan temuan distribusi kewenangan DPR, DPD, MPR, atau DPRD; dosen memberikan umpan balik berbasis pasal hukum yang akurat dan memperdalam analisis dengan membandingkan kerangka Asshiddiqie (2010) tentang konsolidasi lembaga negara pascareformasi (tatap muka di kelas).	BP — Mekanisme kuliah: Dosen mengunggah materi presentasi (slide annotated) dan dokumen panduan penelusuran JDIH DPR RI untuk UU No. 17 Tahun 2014 dan Peraturan DPR RI No. 1 Tahun 2020 ke LMS UNISAN; menyertakan tautan rekaman sidang paripurna DPR sebagai bahan observasi (via LMS; sinkron/asinkron). Mekanisme & materi: Mahasiswa menelusuri secara mandiri pasal-	Bahan Kajian: • Struktur dan kewenangan DPR: fungsi legislasi, pengawasan, dan anggaran; • Fungsi dan kewenangan DPD sebagai perwakilan daerah dalam sistem bikameral asimetris; • Kewenangan MPR dalam kerangka konstitusional pascaamandemen; • Posisi DPRD dalam tata pemerintahan daerah	

Mg Ke-	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)	Penilaian		Bentuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, [Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk	Luring (<i>offline</i>)	Daring (<i>online</i>)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			kelengkapan cakupan empat lembaga, dan konsistensi argumen yuridis Partisipasi kelas & laboratorium: Keaktifan dalam simulasi tanya jawab legislatif (role-play singkat anggota DPR vs DPD) untuk mendiskusikan perbedaan kewenangan; dinilai berdasarkan kemampuan berargumen berbasis fakta normatif, keterbukaan menerima koreksi, dan kolaborasi lintas perspektif (nilai Harmony ICHSA-N)	Mekanisme & materi: Mahasiswa mempresentasikan tabel komparasi awal dalam kelompok kecil (tiap kelompok memfokuskan pada satu lembaga), mendiskusikan tumpang tindih dan celah kewenangan antar-lembaga, kemudian merevisi tabel berdasarkan masukan kelas MP — Metode Pembelajaran: Case-Based Learning: kelompok menganalisis satu kasus di mana terjadi tumpang tindih atau ketegangan kewenangan antar-lembaga perwakilan (misalnya sengketa kewenangan DPD dalam pembahasan RUU), lalu memetakan dasar konstitusional penyelesaiannya	pasal UU No. 17 Tahun 2014 melalui JDIH DPR RI dan JDIH Nasional, mencatat distribusi kewenangan tiap lembaga, kemudian mengisi template tabel komparasi awal sebelum sesi luring; referensi dikelola menggunakan Zotero atau Mendeley MP — Metode Pembelajaran: Project-Based Learning: mahasiswa mengerjakan secara bertahap tabel komparasi kewenangan lembaga perwakilan sebagai produk nyata yang akan digunakan sebagai alat analisis pada minggu-minggu berikutnya Estimasi Waktu: PB 3×50' · PT 3×60' · KM 3×60'.	dan otonomi daerah; • Tata kerja internal DPR berdasarkan Peraturan DPR RI No. 1 Tahun 2020; Pustaka: Asshiddiqie (2006); Asshiddiqie (2010); Budiardjo (2008); Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019; Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020.	

Mg Ke-	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)	Penilaian		Bantuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, [Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk	Luring (<i>offline</i>)	Daring (<i>online</i>)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			Tugas: Tabel komparasi kewenangan empat lembaga (1-2 halaman, format tabel + narasi penjelasan singkat per kolom) yang memuat dimensi: dasar hukum, fungsi legislasi, fungsi pengawasan, fungsi anggaran, dan fungsi lain; dikumpulkan via LMS UNISAN	Estimasi Waktu: PB 3×50' · PT 3×60' · KM 3×60'. Tugas: Melanjutkan dan menyempurnakan tabel komparasi kewenangan empat lembaga perwakilan yang dimulai pada sesi daring; tabel dilengkapi narasi analisis singkat (satu paragraf per lembaga) yang menjelaskan implikasi distribusi kewenangan tersebut bagi efektivitas fungsi perwakilan di Indonesia; mahasiswa merefleksikan apakah distribusi kewenangan yang ada sudah memadai untuk merespons aspirasi daerah, khususnya kawasan Indonesia Timur (nilai Service ICHSA-N); penggunaan Generative AI wajib dideklarasikan secara transparan Deliverable: Tabel komparasi kewenangan empat lembaga perwakilan			

Mg Ke-	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)	Penilaian		Bentuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, [Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk	Luring (offline)	Daring (online)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				(1-2 halaman A4) beserta narasi analisis dalam format Word atau PDF, diunggah ke LMS UNISAN paling lambat sebelum pertemuan Minggu 3			
3,4	Sub-CPMK2: Menganalisis mekanisme hubungan kelembagaan antara parlemen dengan lembaga eksekutif dan yudikatif melalui telaah prosedur konstitusional (checks and balances) dalam sistem presidensial Indonesia.	Mahasiswa mampu: - Menganalisis mekanisme checks and balances antara DPR dan presiden dalam sistem presidensial Indonesia berdasarkan ketentuan UUD NRI 1945 dan prosedur konstitusional yang berlaku - Membedakan pola hubungan parlemen-eksekutif dalam sistem presidensial murni, presidensialisme multipartai, dan sistem parlementer menggunakan kerangka komparatif Lijphart (1999)	Bentuk Penilaian Tes/Unjuk Kerja: Analisis kasus tertulis singkat (in-class): mahasiswa mengidentifikasi mekanisme checks and balances yang berlaku pada satu kasus hubungan DPR-eksekutif yang diberikan dosen; dinilai berdasarkan ketepatan identifikasi prosedur konstitusional, kedalaman analisis, dan	BP — Mekanisme kuliah: Dosen memandu diskusi komparatif tentang efektivitas mekanisme checks and balances dalam presidensialisme Indonesia dibandingkan dengan model Lijphart (1999); dosen memperdalam analisis dengan kerangka konsolidasi lembaga negara pascareformasi dan mengaitkannya dengan kasus-kasus yang dibawa mahasiswa (tatap muka di kelas). Mekanisme & materi: Mahasiswa mempresentasikan kasus empiris yang ditelusuri	BP — Mekanisme kuliah: Dosen mengunggah materi presentasi tentang konsep checks and balances dalam sistem presidensial Indonesia, skema alur prosedural hak DPR terhadap eksekutif, dan diagram hubungan DPR-MK dalam proses judicial review ke LMS UNISAN; menyertakan tautan rekaman sidang penggunaan hak interpelasi atau angket DPR dari kanal resmi DPR RI (via LMS; sinkron/asinkron). Mekanisme & materi:	Bahan Kajian: - Prinsip checks and balances dalam sistem presidensial Indonesia; - Mekanisme hubungan DPR dengan presiden: hak interpelasi, angket, dan menyatakan pendapat; - Hubungan parlemen dengan Mahkamah Konstitusi dalam proses judicial review; - Perbandingan pola relasi parlemen-eksekutif dalam demokrasi presidensial dan parlementer;	15

Mg Ke-	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)	Penilaian		Bentuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, [Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk	Luring (<i>offline</i>)	Daring (<i>online</i>)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		- Menelaah prosedur konstitusional penggunaan hak interpelasi, angket, dan menyatakan pendapat DPR sebagai instrumen pengawasan terhadap eksekutif - Mengidentifikasi mekanisme hubungan antara parlemen dengan Mahkamah Konstitusi dalam pengujian undang-undang (judicial review) sebagai bagian dari sistem checks and balances - Mengevaluasi kecukupan mekanisme checks and balances yang ada dalam menjamin akuntabilitas pemerintahan di Indonesia	penggunaan referensi hukum yang akurat Partisipasi kelas & laboratorium: Keaktifan dalam debat kelompok tentang efektivitas mekanisme pengawasan parlemen terhadap eksekutif; dinilai berdasarkan kualitas argumen berbasis data empiris, kejujuran dalam mengakui kelemahan posisi argumen, dan kemampuan memadukan perspektif hukum tata negara dengan ilmu politik (nilai Harmony dan Integrity ICHSA-N)	secara daring dalam format diskusi kelompok kecil, kemudian secara bersama-sama memetakan alur prosedur konstitusional pada papan tulis; kelas mendiskusikan celah dan kekuatan mekanisme yang ada MP — Metode Pembelajaran: Case-Based Learning: kelompok menganalisis secara mendalam satu kasus penggunaan hak DPR terhadap eksekutif (atau satu kasus judicial review undang-undang oleh MK atas permintaan yang melibatkan parlemen), mengidentifikasi prosedur konstitusional yang dijalankan, dan mengevaluasi efektivitasnya dalam menjamin akuntabilitas	Mahasiswa menelaah materi yang diunggah, menelusuri dokumen UUD NRI 1945 dan UU No. 17 Tahun 2014 pasal-pasal terkait hak DPR melalui JDIH, kemudian mengidentifikasi satu kasus empiris penggunaan hak DPR terhadap eksekutif dan mencatat kronologi prosedur konstitusionalnya sebagai bahan diskusi luring MP — Metode Pembelajaran: Case-Based Learning: mahasiswa secara mandiri menelusuri dan merangkum satu kasus penggunaan hak interpelasi, angket, atau menyatakan pendapat DPR, lalu mengidentifikasi tahapan prosedur konstitusional yang dilalui sebagai	Pustaka: Lijphart (1999); Asshiddiqie (2006); Asshiddiqie (2010); Budiardjo (2008); Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019.	

Mg Ke-	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)	Penilaian		Bantuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, [Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk	Luring (<i>offline</i>)	Daring (<i>online</i>)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			Tugas: Makalah analisis prosedural (2-3 halaman A4) yang menelaah satu mekanisme checks and balances spesifik (interpelasi, angket, atau hak menyatakan pendapat) berdasarkan ketentuan konstitusional dan satu kasus empiris penggunaannya oleh DPR; dikumpulkan via LMS UNISAN	Estimasi Waktu: PB 3×50' · PT 3×60' · KM 3×60'. Tugas: Mahasiswa menyusun makalah analisis prosedural yang menelaah satu mekanisme checks and balances antara DPR dan eksekutif atau DPR dan MK secara mendalam; makalah menjelaskan dasar konstitusional mekanisme tersebut, menelusuri satu kasus empiris penggunaannya, dan mengevaluasi apakah mekanisme itu berjalan efektif berdasarkan fakta empiris yang tersedia; mahasiswa diharuskan menggunakan data dan fakta secara jujur tanpa distorsi dalam argumentasi (nilai Integrity ICHSA-N); penggunaan Generative AI sebatas asistensi kerangka argumen dan wajib dideklarasikan secara transparan	persiapan analisis kelompok pada sesi luring Estimasi Waktu: PB 3×50' · PT 3×60' · KM 3×60'.		

Mg Ke-	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)	Penilaian		Bentuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, [Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk	Luring (offline)	Daring (online)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Deliverable: Makalah analisis prosedural 2-3 halaman A4 dalam format Word atau PDF (tidak termasuk daftar pustaka), dilengkapi daftar rujukan menggunakan Zotero atau Mendeley, diunggah ke LMS UNISAN paling lambat sebelum pertemuan Minggu 4			
			Bentuk Penilaian Tes/Unjuk Kerja: Tidak ada tes tertulis pada minggu ini; penilaian difokuskan pada kualitas presentasi dan laporan analisis kasus; dosen dapat mengajukan pertanyaan pendalaman lisan kepada kelompok saat presentasi untuk menguji pemahaman	BP — Mekanisme kuliah: Dosen memfasilitasi sesi presentasi kelompok (tiap kelompok 10-12 menit presentasi dan 5-8 menit tanya jawab); dosen memberikan umpan balik substantif berbasis kerangka teoritis Lijphart (1999) dan Asshiddiqie (2010) serta merangkum pola-pola temuan lintas kelompok di akhir sesi (tatap muka di kelas). Mekanisme & materi: Tiap kelompok mempresentasikan laporan	BP — Mekanisme kuliah: Dosen mengunggah panduan penyusunan laporan analisis kasus (rubrik penilaian, format penulisan, dan kriteria evaluasi efektivitas checks and balances) serta contoh analisis kasus empiris ke LMS UNISAN; membuka forum konsultasi daring untuk kelompok yang memerlukan arahan pemilihan kasus (via LMS; sinkron/asinkron). Mekanisme & materi:	Bahan Kajian: • Analisis empiris mekanisme checks and balances dalam sistem presidensial Indonesia; • Studi kasus penggunaan hak pengawasan DPR terhadap eksekutif; • Evaluasi efektivitas relasi kelembagaan parlemen-eksekutif-yudikatif pascareformasi; • Kerangka komparatif demokrasi presidensial multipartai;	

Mg Ke-	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)	Penilaian		Bentuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, [Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk	Luring (<i>offline</i>)	Daring (<i>online</i>)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			prosedur konstitusional Partisipasi kelas & laboratorium: Kualitas umpan balik yang diberikan kepada kelompok lain saat sesi presentasi; dinilai berdasarkan relevansi pertanyaan atau tanggapan, kemampuan mengintegrasikan perspektif hukum dan politik secara harmonis, serta kesediaan menerima kritik secara konstruktif (nilai Harmony dan Adaptability ICHSA-N) Tugas: Laporan analisis kasus kelompok	analisis kasus di depan kelas; kelompok lain memberikan tanggapan terstruktur berdasarkan panduan peer-review yang disiapkan dosen; kelas bersama-sama merumuskan simpulan tentang pola efektivitas dan kelemahan checks and balances dalam sistem presidensial Indonesia MP — Metode Pembelajaran: Case-Based Learning: presentasi multi-kasus lintas kelompok memungkinkan perbandingan sistematis berbagai mekanisme checks and balances, sehingga kelas secara kolektif membangun pemahaman yang lebih komprehensif tentang dinamika relasi kelembagaan parlemen-eksekutif-yudikatif di Indonesia	Kelompok mahasiswa mengerjakan laporan analisis kasus secara kolaboratif melalui platform dokumen bersama; menelusuri dokumen primer (rekaman sidang, risalah rapat, putusan MK) melalui JDIH DPR RI dan situs MK RI; mengelola referensi menggunakan Zotero atau Mendeley; mengunggah draf awal ke LMS untuk umpan balik dosen sebelum presentasi MP — Metode Pembelajaran: Project-Based Learning: kelompok mengembangkan laporan analisis kasus empiris sebagai produk intelektual kolaboratif yang mendemonstrasikan kemampuan mengaplikasikan kerangka checks and	Pustaka: Lijphart (1999); Asshiddiqie (2006); Asshiddiqie (2010); Norton (2013); Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019; Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020.	

Mg Ke-	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)	Penilaian		Bentuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, [Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk	Luring (<i>offline</i>)	Daring (<i>online</i>)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			(4-5 halaman A4, tidak termasuk daftar pustaka) yang memuat: deskripsi kasus, identifikasi mekanisme konstitusional yang berlaku, analisis efektivitas checks and balances, dan simpulan evaluatif; dilengkapi slide presentasi 8-12 halaman; dikumpulkan via LMS UNISAN	Estimasi Waktu: PB 3×50' · PT 3×60' · KM 3×60'. Tugas: Kelompok (3-4 mahasiswa) menyusun laporan analisis kasus empiris tentang satu mekanisme checks and balances antara parlemen dan eksekutif atau parlemen dan yudikatif di Indonesia; laporan memuat: (1) deskripsi kasus beserta konteks konstitusionalnya, (2) identifikasi dan penjelasan mekanisme prosedural yang berlaku berdasarkan UUD NRI 1945 dan UU No. 17 Tahun 2014, (3) analisis efektivitas mekanisme berdasarkan bukti empiris dari kasus, (4) perbandingan dengan kerangka demokrasi presidensial Lijphart (1999), dan (5) simpulan evaluatif beserta rekomendasi; mahasiswa dituntut menggunakan fakta secara akurat dan	balances pada situasi nyata sistem ketatanegaraan Indonesia Estimasi Waktu: PB 3×50' · PT 3×60' · KM 3×60'.		

Mg Ke-	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)	Penilaian		Bantuan Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, [Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk	Luring (offline)	Daring (online)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				jujur serta mempertimbangkan dampak mekanisme tersebut terhadap kepentingan publik (nilai Integrity dan Service ICHSA-N); penggunaan Generative AI wajib dideklarasikan Deliverable: Laporan analisis kasus kelompok 4-5 halaman A4 dalam format Word atau PDF beserta slide presentasi 8-12 halaman dalam format PowerPoint atau PDF, keduanya diunggah ke LMS UNISAN paling lambat pada hari presentasi			
5,6	Sub-CPMK3: Menganalisis tahapan proses legislasi (Programme legislasi nasional hingga pengesahan) dan mengidentifikasi titik kritis yang memengaruhi kualitas produk undang-undang melalui studi kasus satu UU yang berdampak pada	Mahasiswa mampu: • Menguraikan tahapan proses legislasi nasional mulai dari penyusunan Program Legislasi Nasional (Prolegnas) hingga pengesahan dan pengundangan undang-undang sesuai UU No.	Bentuk Penilaian Tes/Unjuk Kerja: Tidak ada tes formal minggu ini; penilaian melalui kualitas analisis tertulis dan diskusi kasus: ketepatan	BP — Mekanisme kuliah: Dosen memfasilitasi presentasi singkat (15 menit) memetakan tahapan legislasi nasional menggunakan bagan di papan tulis, dilanjutkan diskusi kelompok kecil berbasis kasus UU yang telah dipilih mahasiswa;	BP — Mekanisme kuliah: Dosen mengunggah modul teks tahapan legislasi nasional, dokumen Prolegnas DPR RI tahun berjalan, dan tautan JDIH DPR RI ke LMS UNISAN; dosen memandu sesi sinkron singkat (30 menit via	Bahan Kajian: • Proses pembentukan undang-undang; • Fungsi legislasi parlemen; • Program Legislasi Nasional (Prolegnas): perencanaan, penyusunan	14

Mg Ke-	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)	Penilaian		Bantuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, [Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk	Luring (<i>offline</i>)	Daring (<i>online</i>)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	pemerintahan daerah di Kawasan Timur Indonesia.	12 Tahun 2011 beserta perubahannya • Mengidentifikasi minimal tiga titik kritis dalam proses legislasi (perencanaan, pembahasan, pengesahan) yang berpotensi memengaruhi kualitas produk undang-undang berdasarkan dokumen primer yang ditelusuri melalui JDIH • Membandingkan alur pembentukan UU berdasarkan prosedur normatif dengan praktik aktual pada satu UU yang berdampak pada pemerintahan daerah di Kawasan Timur Indonesia • Menunjukkan sikap integritas akademik dalam menelusuri dan mengutip dokumen peraturan perundang-	pemetaan tahapan legislasi, kedalaman identifikasi titik kritis, dan konsistensi antara klaim analitik dengan bukti dokumen primer Partisipasi kelas & laboratorium: Keaktifan dalam diskusi Case-Based Learning dinilai dari kemampuan mengajukan argumen berbasis dokumen (bukan opini kosong), merespons pandangan rekan secara konstruktif, dan menyatakan penggunaan alat bantu AI secara transparan jika digunakan	dosen memberikan umpan balik langsung terhadap draf bagan alur yang dikerjakan mahasiswa (tatap muka di kelas). Mekanisme & materi: Mahasiswa dalam kelompok kecil (3-4 orang) menganalisis dokumen naskah akademik dan risalah pembahasan UU pilihan yang berdampak pada Kawasan Timur Indonesia, kemudian mengidentifikasi titik kritis pada masing-masing tahap legislasi dan mendiskusikannya bersama kelompok lain MP — Metode Pembelajaran: Case-Based Learning: kelompok mempresentasikan temuan awal analisis kasus UU di depan kelas, diikuti diskusi pleno yang membandingkan titik kritis	video conference) untuk memberikan orientasi penelusuran dokumen dan membuka ruang tanya-jawab awal (via LMS; sinkron/asinkron). Mekanisme & materi: Mahasiswa menelusuri secara mandiri dokumen UU No. 12 Tahun 2011 beserta perubahannya melalui JDIH Nasional, membaca modul yang diunggah dosen, dan menyiapkan draf awal bagan alur legislasi sebelum sesi luring MP — Metode Pembelajaran: Case-Based Learning: mahasiswa secara mandiri mengidentifikasi satu UU yang berdampak pada pemerintahan daerah di Kawasan Timur Indonesia sebagai kasus awal untuk dianalisis bersama pada	naskah akademik, pembahasan, pengesahan, dan pengundangan; • Titik kritis kualitas produk legislasi pada kasus UU yang berdampak pada Kawasan Timur Indonesia; Pustaka: Asshiddiqie (2006); Budiardjo (2008); Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019; Asshiddiqie (2010).	

Mg Ke-	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)	Penilaian		Bentuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, [Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk	Luring (<i>offline</i>)	Daring (<i>online</i>)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		undangan secara benar dan transparan	Tugas: Peta alur legislasi beserta anotasi titik kritis: dokumen visual (bagan/tabel) yang menggambarkan tahapan Prolegnas hingga pengesahan dan anotasi tertulis mengidentifikasi titik kritis pada satu UU pilihan, panjang anotasi 400-600 kata, dikumpulkan melalui LMS UNISAN	antar kasus UU yang dipilih kelompok berbeda Estimasi Waktu: PB 3×50' · PT 3×60' · KM 3×60'. Tugas: Mahasiswa secara individu menyusun peta alur legislasi nasional berdasarkan UU No. 12 Tahun 2011 beserta perubahannya, kemudian mengaplikasikannya pada satu UU konkret yang berdampak pada pemerintahan daerah di Kawasan Timur Indonesia (contoh: UU tentang Otonomi Daerah atau UU terkait daerah otonomi baru di Papua/Maluku/NTT). Peta alur disajikan dalam bentuk bagan visual yang dilengkapi anotasi tertulis mengidentifikasi minimal tiga titik kritis beserta penjelasan mengapa titik tersebut berpotensi memengaruhi kualitas produk undang-undang.	sesi luring Estimasi Waktu: PB 3×50' · PT 3×60' · KM 3×60'.		

Mg Ke-	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)	Penilaian		Bentuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, [Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk	Luring (<i>offline</i>)	Daring (<i>online</i>)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Mahasiswa wajib mencantumkan pernyataan penggunaan AI generatif jika digunakan dalam proses penyusunan. Deliverable: Satu berkas dokumen (PDF atau DOCX) berisi bagan alur legislasi visual dan anotasi tertulis 400-600 kata, dikumpulkan melalui LMS UNISAN paling lambat H-1 sebelum perkuliahan Minggu 6			
			Bentuk Penilaian Tes/Unjuk Kerja: Tidak ada tes formal minggu ini; penilaian melalui kualitas laporan analisis tertulis: kedalaman evaluasi dampak titik kritis, ketajaman argumen tentang faktor penentu	BP — Mekanisme kuliah: Dosen memfasilitasi sesi presentasi kelompok (masing-masing 8-10 menit) di mana tiap kelompok memaparkan evaluasi dampak titik kritis UU yang dikaji; dosen memimpin diskusi pleno untuk mensintesis pola umum faktor yang memengaruhi kualitas legislasi lintas kasus yang dipresentasikan (tatap	BP — Mekanisme kuliah: Dosen mengunggah panduan penilaian kualitas produk legislasi (kerangka analisis muatan, konsistensi, dan dampak implementasi) ke LMS UNISAN; dosen membuka forum diskusi asinkron selama 3 hari untuk mahasiswa memposting satu temuan kritis dari kasus UU masing-masing dan merespons temuan	Bahan Kajian: • Proses pembentukan undang-undang: evaluasi kualitas produk legislasi; • Fungsi legislasi parlemen: analisis muatan dan dampak implementasi; • Representasi dan akuntabilitas parlemen dalam produk legislasi;	

Mg Ke-	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)	Penilaian		Bantuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, [Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk	Luring (<i>offline</i>)	Daring (<i>online</i>)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			kualitas legislasi, dan kecukupan bukti empiris yang digunakan Partisipasi kelas & laboratorium: Keaktifan dinilai dari kemampuan mensintesis perspektif hukum tata negara dan perspektif politik empiris secara koheren dalam diskusi, serta kemampuan memberikan kritik konstruktif terhadap argumen rekan berdasarkan fakta dokumen Tugas: Laporan analisis kritis kualitas produk legislasi: esai analitik terstruktur 800-1000 kata yang	muka di kelas). Mekanisme & materi: Mahasiswa mempresentasikan laporan analisis kritis kelompok menggunakan perangkat lunak presentasi, merespons pertanyaan dan kritik dari kelompok lain, serta memperbaiki argumen berdasarkan umpan balik sesi pleno sebelum menyusun laporan individu final MP — Metode Pembelajaran: Case-Based Learning dengan presentasi dan diskusi pleno: sintesis lintas kasus mendorong mahasiswa membandingkan konteks legislasi yang berbeda-beda di Kawasan Timur Indonesia dan mengembangkan kerangka evaluasi yang lebih	minimal satu rekan (via LMS; sinkron/asinkron). Mekanisme & materi: Mahasiswa menelaah referensi sekunder yang relevan melalui basis data daring, memperkuat argumen laporan dengan membandingkan kasus UU yang dikaji dengan literatur tentang kualitas legislasi dan tata kelola daerah; mahasiswa memanfaatkan Zotero atau Mendeley untuk mengelola referensi secara terorganisasi MP — Metode Pembelajaran: Case-Based Learning berbasis forum asinkron: mahasiswa menganalisis kasus UU secara mandiri dan membangun argumen kolaboratif melalui tanggapan antar-rekan di forum LMS	• Studi kasus kebijakan kawasan Indonesia Timur: dampak implementasi UU pada pemerintahan daerah; Pustaka: Asshiddiqie (2006); Asshiddiqie (2010); Budiardjo (2008); Putnam (1993); Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019.	

Mg Ke-	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)	Penilaian		Bentuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, [Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk	Luring (<i>offline</i>)	Daring (<i>online</i>)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			mengevaluasi dampak titik kritis pada implementasi UU yang dikaji terhadap pemerintahan daerah Kawasan Timur Indonesia, dilengkapi daftar pustaka berformat APA yang dikelola melalui Zotero atau Mendeley	komprehensif Estimasi Waktu: PB 3×50' · PT 3×60' · KM 3×60'. Tugas: Melanjutkan peta alur Minggu 5, mahasiswa secara individu menyusun laporan analisis kritis yang mengevaluasi dampak minimal dua titik kritis yang telah diidentifikasi terhadap substansi dan implementasi UU yang dikaji di pemerintahan daerah Kawasan Timur Indonesia. Laporan wajib mengintegrasikan perspektif hukum tata negara (merujuk pada UU No. 12 Tahun 2011 dan literatur Asshiddiqie) dan perspektif politik empiris (merujuk pada Budiardjo atau Putnam). Mahasiswa juga harus mengajukan satu rekomendasi perbaikan proses legislasi yang relevan bagi konteks Kawasan Timur Indonesia. Pengelolaan referensi	Estimasi Waktu: PB 3×50' · PT 3×60' · KM 3×60'.		

Mg Ke-	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)	Penilaian		Bantuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, [Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk	Luring (<i>offline</i>)	Daring (<i>online</i>)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				wajib menggunakan Zotero atau Mendeley, dan penggunaan AI generatif wajib dinyatakan secara transparan. Deliverable: Esai analitik terstruktur 800-1000 kata (PDF atau DOCX) dilengkapi daftar pustaka berformat APA, dikumpulkan melalui LMS UNISAN paling lambat H-1 sebelum perkuliahan Minggu 7; laporan ini menjadi bagian dari portofolio yang digunakan dalam penilaian menuju UTS			
7	Sub-CPMK4: Mengevaluasi pelaksanaan fungsi pengawasan dan fungsi anggaran DPR/DPRD terhadap kebijakan pemerintah daerah dan desa di Kawasan Timur Indonesia melalui studi kasus dokumen APBN/APBD atau hasil rapat dengar pendapat parlemen.	Mahasiswa mampu: • Menguraikan mekanisme pelaksanaan fungsi pengawasan DPR/DPRD (rapat dengar pendapat, hak interpelasi, hak angket) dan fungsi anggaran (pembahasan dan penetapan)	Bentuk Penilaian Tes/Unjuk Kerja: Tidak ada tes formal minggu ini; penilaian melalui kualitas analisis kasus: ketepatan penggunaan kerangka normatif	BP — Mekanisme kuliah: Dosen memaparkan kerangka evaluasi fungsi pengawasan dan anggaran parlemen (20 menit), kemudian memfasilitasi diskusi kelompok kecil di mana masing-masing kelompok menganalisis kasus daerah yang berbeda di Kawasan Timur	BP — Mekanisme kuliah: Dosen mengunggah ke LMS UNISAN: ringkasan mekanisme pengawasan dan anggaran parlemen berdasarkan UU No. 17 Tahun 2014 dan Peraturan DPR RI No. 1 Tahun 2020, panduan penelusuran dokumen	Bahan Kajian: • Fungsi pengawasan dan anggaran parlemen; • Mekanisme rapat dengar pendapat, hak interpelasi, dan hak angket DPR/DPRD; • Pembahasan dan penetapan APBN/APBD	7

Mg Ke-	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)	Penilaian		Bantuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, [Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk	Luring (<i>offline</i>)	Daring (<i>online</i>)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		APBN/APBD) berdasarkan UU No. 17 Tahun 2014 dan Peraturan DPR RI No. 1 Tahun 2020 • Mengevaluasi efektivitas pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD terhadap kebijakan pemerintah daerah dan desa di Kawasan Timur Indonesia menggunakan bukti dari dokumen APBD atau risalah rapat dengar pendapat • Mengidentifikasi kesenjangan antara norma pengawasan dan anggaran parlemen dengan praktik aktual pada kasus spesifik daerah otonom di Kawasan Timur Indonesia • Menunjukkan orientasi Service dengan merefleksikan	(UU No. 17 Tahun 2014 dan Peraturan DPR RI No. 1 Tahun 2020) sebagai pisau analisis, kedalaman evaluasi efektivitas pengawasan, dan relevansi rekomendasi terhadap konteks Kawasan Timur Indonesia Partisipasi kelas & laboratorium: Keaktifan dinilai dari kemampuan mengajukan pertanyaan dan kritik berbasis dokumen APBD/risalah RDP yang ditelusuri, serta kemampuan mensintesis dimensi normatif dan empiris dalam	Indonesia; dosen mendampingi setiap kelompok dan memberikan pertanyaan pemantik untuk memperdalam analisis (tatap muka di kelas). Mekanisme & materi: Mahasiswa dalam kelompok menganalisis dokumen APBD atau risalah RDP yang telah ditelusuri, mengidentifikasi kesenjangan antara norma pengawasan parlemen dan praktik aktual, kemudian mempresentasikan temuan singkat (5-7 menit per kelompok) di depan kelas untuk mendapat umpan balik sebelum menyusun laporan individual MP — Metode Pembelajaran: Case-Based Learning dengan analisis dokumen kelompok dan presentasi pleno: mendorong	APBD melalui portal resmi daerah dan JDIH, serta contoh risalah RDP DPR/DPRD yang dapat diakses publik (via LMS; sinkron/asinkron). Mekanisme & materi: Mahasiswa secara mandiri menelusuri dokumen APBD atau risalah RDP dari satu kabupaten/kota/provinsi di Kawasan Timur Indonesia melalui portal resmi daerah atau JDIH, dan menyiapkan ringkasan temuan awal (satu paragraf) yang diunggah ke forum LMS sebelum sesi luring MP — Metode Pembelajaran: Case-Based Learning berbasis dokumen primer: mahasiswa menganalisis dokumen APBD atau risalah RDP sebagai kasus nyata	oleh parlemen; • Studi kasus kebijakan kawasan Indonesia Timur: efektivitas pengawasan DPRD pada daerah otonom; Pustaka: Asshiddiqie (2006); Asshiddiqie (2010); Budiardjo (2008); Norton (2013); Farida (2021); Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019; Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020.	

Mg Ke-	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)	Penilaian		Bentuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, [Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk	Luring (<i>offline</i>)	Daring (<i>online</i>)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		dampak pengawasan parlemen terhadap kepentingan masyarakat di Kawasan Timur Indonesia dalam argumen analitik yang disusun	diskusi kelompok Tugas: Laporan analisis fungsi pengawasan dan anggaran: dokumen analisis 900-1100 kata yang mengevaluasi efektivitas pengawasan DPRD pada satu daerah di Kawasan Timur Indonesia berdasarkan dokumen APBD atau risalah RDP yang ditelusuri, dikumpulkan melalui LMS UNISAN	mahasiswa membandingkan pola pengawasan DPRD lintas daerah di Kawasan Timur Indonesia dan mengidentifikasi faktor struktural yang memengaruhi efektivitasnya Estimasi Waktu: PB 3×50' · PT 3×60' · KM 3×60'. Tugas: Mahasiswa secara individu menyusun laporan analisis evaluatif terhadap pelaksanaan fungsi pengawasan dan fungsi anggaran DPR/DPRD di satu daerah Kawasan Timur Indonesia. Laporan wajib: (1) menguraikan mekanisme normatif pengawasan dan anggaran berdasarkan UU No. 17 Tahun 2014 dan Peraturan DPR RI No. 1 Tahun 2020 sebagai kerangka evaluasi; (2) menganalisis data empiris dari dokumen APBD atau risalah rapat	untuk mengevaluasi efektivitas fungsi pengawasan dan anggaran DPRD Estimasi Waktu: PB 3×50' · PT 3×60' · KM 3×60'.		

Mg Ke-	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)	Penilaian		Bentuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, [Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk	Luring (<i>offline</i>)	Daring (<i>online</i>)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				dengar pendapat yang ditelusuri melalui portal resmi daerah atau JDIH; (3) mengidentifikasi minimal dua kesenjangan antara norma dan praktik beserta penjelasan faktor penyebabnya; dan (4) merumuskan satu rekomendasi yang berorientasi pada kepentingan publik daerah. Penggunaan AI generatif wajib dinyatakan secara transparan; referensi dikelola melalui Zotero atau Mendeley. Deliverable: Laporan analisis evaluatif 900-1100 kata (PDF atau DOCX) dilengkapi tautan atau salinan dokumen APBD/risalah RDP yang dijadikan sumber empiris dan daftar pustaka berformat APA, dikumpulkan melalui LMS UNISAN paling lambat H-2 sebelum UTS; laporan ini merupakan komponen portofolio penilaian UTS			

Mg Ke-	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)	Penilaian		Bentuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, [Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk	Luring (<i>offline</i>)	Daring (<i>online</i>)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
8		Mahasiswa mampu: - Menguraikan secara tepat tahapan proses legislasi nasional dari Prolegnas hingga pengesahan berdasarkan kerangka normatif UU No. 12 Tahun 2011 beserta perubahannya - Menganalisis titik kritis dalam proses legislasi dan mengevaluasi dampaknya terhadap kualitas produk undang-undang pada kasus UU yang berdampak pada Kawasan Timur Indonesia - Mengevaluasi efektivitas fungsi pengawasan dan anggaran DPR/DPRD dengan mengintegrasikan perspektif normatif dan	Bentuk Penilaian Tes/Unjuk Kerja: Ujian Tengah Semester tertulis (90 menit, buku terbuka terbatas): soal analisis kasus terdiri dari pertanyaan esai terstruktur yang menguji kemampuan mahasiswa menguraikan proses legislasi, mengidentifikasi titik kritis, dan mengevaluasi fungsi pengawasan parlemen; penilaian berdasarkan ketepatan penerapan kerangka normatif, kedalaman analisis empiris,	BP — Mekanisme kuliah: Dosen memimpin pelaksanaan UTS tertulis di ruang kuliah sesuai jadwal; dosen memastikan kelengkapan berkas soal dan lembar jawaban serta mengawasi jalannya ujian sesuai aturan akademik UNISAN (tatap muka di kelas). Mekanisme & materi: Mahasiswa mengerjakan soal UTS secara individual; lembar jawaban dikumpulkan langsung kepada dosen di akhir sesi ujian MP — Metode Pembelajaran: Evaluasi sumatif tertulis: mahasiswa mendemonstrasikan kemampuan mengintegrasikan konsep proses legislasi dan fungsi	BP — Mekanisme kuliah: Dosen mengunggah kisi-kisi UTS (cakupan materi, tipe soal, dan rubrik penilaian) ke LMS UNISAN minimal tiga hari sebelum pelaksanaan; dosen membuka sesi tanya-jawab daring (forum atau video conference singkat 30 menit) untuk klarifikasi cakupan materi UTS (via LMS; sinkron/asinkron). Mekanisme & materi: Mahasiswa menelaah ulang seluruh materi Minggu 5-7 secara mandiri menggunakan modul dan dokumen yang telah diunggah di LMS UNISAN; mahasiswa memanfaatkan Zotero atau Mendeley untuk mengecek kembali referensi yang digunakan	Bahan Kajian: - Proses pembentukan undang-undang: konsolidasi Prolegnas hingga pengesahan; - Fungsi legislasi parlemen: titik kritis dan kualitas produk undang-undang; - Fungsi pengawasan dan anggaran parlemen: evaluasi efektivitas DPR/DPRD; - Studi kasus kebijakan kawasan Indonesia Timur: integrasi analisis legislasi dan pengawasan; Pustaka: Asshiddiqie (2006); Asshiddiqie (2010); Budiardjo (2008); Norton (2013); Farida (2021); Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011	—

Mg Ke-	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)	Penilaian		Bantuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, [Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk	Luring (<i>offline</i>)	Daring (<i>online</i>)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		empiris secara koheren Menyusun argumen analitik yang didukung bukti dari dokumen primer dan pustaka akademik secara akurat, jujur, dan sistematis	dan sistematika argumen Partisipasi kelas & laboratorium: Tidak dinilai pada minggu UTS; penilaian terfokus pada kinerja tes dan kualitas portofolio tugas Minggu 5-7 yang telah dikumpulkan Tugas: Tidak ada tugas baru; mahasiswa wajib memastikan seluruh tugas Minggu 5-7 (peta alur legislasi, laporan analisis kritis, laporan pengawasan dan anggaran) telah terkumpul di LMS UNISAN sebagai	pengawasan parlemen melalui analisis kasus terbuka yang menuntut penalaran analitik berbasis bukti Estimasi Waktu: PB 3×50' · PT 3×60' · KM 3×60'. Tugas: Tidak ada penugasan baru pada minggu UTS. Mahasiswa memastikan seluruh tugas portofolio dari Minggu 5 hingga 7 telah dikumpulkan lengkap di LMS UNISAN sebagai bagian dari komponen penilaian UTS. Portofolio tugas (peta alur legislasi, laporan analisis kritis, dan laporan pengawasan anggaran) dievaluasi bersama dengan hasil tes UTS untuk mengukur capaian Sub-CPMK3 dan Sub-CPMK4 secara holistik. Deliverable: Lembar jawaban UTS tertulis dikumpulkan langsung di	dalam portofolio tugas MP — Metode Pembelajaran: Pembelajaran mandiri terstruktur berbasis portofolio: mahasiswa mengonsolidasi pemahaman lintas topik Minggu 5-7 sebagai persiapan ujian komprehensif Estimasi Waktu: PB 3×50' · PT 3×60' · KM 3×60'.	sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019; Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020.	

Mg Ke-	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)	Penilaian		Bantuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, [Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk	Luring (offline)	Daring (online)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			komponen portofolio UTS	ruang ujian; portofolio digital Minggu 5-7 telah terkumpul di LMS UNISAN sebelum hari pelaksanaan UTS			
9,10	Sub-CPMK5: Menganalisis sistem pemilihan Indonesia (sistem proporsional terbuka, ambang batas parlemen, daerah pemilihan) dan menghubungkan desain sistem pemilu dengan pola rekrutmen serta komposisi anggota parlemen di tingkat nasional dan lokal.	Mahasiswa mampu: • Menguraikan mekanisme sistem proporsional terbuka, ketentuan ambang batas parlemen (parliamentary threshold), dan pembagian daerah pemilihan (dapil) berdasarkan regulasi pemilihan Indonesia yang berlaku • Membandingkan efek sistem proporsional terbuka dengan varian sistem pemilu lain terhadap pola rekrutmen kandidat legislatif di tingkat nasional (DPR) dan lokal (DPRD)	Bentuk Penilaian Tes/Unjuk Kerja: Kuis singkat pada akhir sesi daring: menganalisis skenario hipotetis besaran dapil dan ambang batas parlemen, dinilai berdasarkan ketepatan penerapan konsep proporsionalitas dan konsistensi argumen (bukan sekadar hafalan regulasi) Partisipasi kelas & laboratorium: Keaktifan dalam diskusi Case-Based Learning:	BP — Mekanisme kuliah: Dosen memfasilitasi diskusi kelas terstruktur selama 100 menit: 20 menit presentasi ringkas temuan diskusi daring (dosen meluruskan miskonsepsi), 50 menit diskusi kelompok kecil (4-5 mahasiswa) menganalisis data dapil dan komposisi parlemen kawasan Indonesia Timur, 30 menit presentasi hasil tiap kelompok dan pleno kelas; dosen menyimpulkan dengan menekankan kaitan desain sistem pemilu dengan kualitas representasi (tatap muka di kelas). Mekanisme & materi:	BP — Mekanisme kuliah: Dosen mengunggah video kuliah ringkas (20-25 menit) di LMS UNISAN yang menjelaskan tiga komponen desain pemilu (formula proporsional, ambang batas, dan dapil) dengan data pemilu legislatif 2019 dan 2024 sebagai ilustrasi kuantitatif; dosen membuka forum diskusi asinkron LMS dengan pertanyaan pemantik: bagaimana besaran dapil di wilayah Papua dan Maluku mempengaruhi keterwakilan partai lokal? (via LMS; sinkron/asinkron). Mekanisme & materi:	Bahan Kajian: • Sistem proporsional terbuka: formula alokasi kursi, parliamentary threshold, dan besaran dapil; • Hubungan desain sistem pemilu dengan pola rekrutmen kandidat legislatif; • Komposisi anggota parlemen nasional dan lokal sebagai hasil interaksi sistem pemilu; • Keterwakilan kawasan Indonesia Timur dalam distribusi dapil dan kursi DPR/DPRD; Pustaka:	14

Mg Ke-	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)	Penilaian		Bantuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, [Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk	Luring (<i>offline</i>)	Daring (<i>online</i>)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		• Menganalisis hubungan antara besaran dapil (district magnitude) dengan peluang keterwakilan partai kecil dan calon perseorangan berbasis data pemilu legislatif • Mengidentifikasi implikasi desain sistem pemilu terhadap komposisi anggota parlemen berdasarkan gender, afiliasi partai, dan latar belakang profesional pada satu periode pemilu	mahasiswa menyampaikan argumen berbasis data, merespons perspektif rekan secara substantif, dan menghindari klaim tanpa rujukan (mencerminkan nilai Integrity ICHSA-N) Tugas: Tabel komparasi sistem pemilu: mahasiswa menyusun tabel analitik 2-3 halaman yang membandingkan desain sistem proporsional terbuka Indonesia dengan satu negara lain dari perspektif rekrutmen dan komposisi parlemen, dilengkapi	Mahasiswa membawa data dapil yang telah diunduh, menyiapkan argumen tertulis singkat dari hasil diskusi daring, dan aktif dalam sesi pleno dengan mengintegrasikan perspektif hukum (UU No. 17 Tahun 2014) dan perspektif komparatif (Hazan & Rahat 2010) MP — Metode Pembelajaran: Case-Based Learning: kelompok mengerjakan lembar kasus berisi data aktual dapil dan kursi parlemen kawasan Indonesia Timur, lalu menyimpulkan implikasi desain pemilu terhadap pola rekrutmen dan komposisi parlemen daerah tersebut Estimasi Waktu: PB 3×50' · PT 3×60' · KM 3×60'. Tugas:	Mahasiswa mengakses video, membaca bahan bacaan yang ditautkan di LMS (Norton 2013 Bab relevan dan Hazan & Rahat 2010), menjawab pertanyaan pemantik forum diskusi minimal 150 kata sebelum sesi luring, dan mengunduh data dapil serta perolehan kursi dari situs KPU untuk persiapan diskusi kelas MP — Metode Pembelajaran: Case-Based Learning: mahasiswa menganalisis kasus konkret distribusi kursi DPR pada dapil kawasan Indonesia Timur (Maluku, Papua, NTT) berdasarkan data pemilu terkini sebelum mendiskusikannya secara tatap muka Estimasi Waktu: PB 3×50' · PT 3×60' · KM 3×60'.	Hazan, R. Y., & Rahat, G. (2010); Lijphart, A. (1999); Budiardjo, M. (2008); Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014.	

Mg Ke-	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)	Penilaian		Bentuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, [Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk	Luring (<i>offline</i>)	Daring (<i>online</i>)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			sumber primer (JDIH atau data KPU)	Mahasiswa secara individu menyusun tabel komparasi analitik yang membandingkan sistem proporsional terbuka Indonesia dengan satu sistem pemilu negara lain pilihan mahasiswa (misalnya sistem proporsional tertutup Jerman atau sistem campuran Selandia Baru) dari sisi formula alokasi kursi, ambang batas, besaran dapil, pola rekrutmen kandidat, dan komposisi parlemen yang dihasilkan; analisis didasarkan pada data empiris pemilu terkini kedua negara dan dikaitkan dengan argumen dari pustaka yang ditentukan; mahasiswa wajib mencantumkan pernyataan penggunaan AI generatif bila digunakan dalam penyusunan kerangka argumen Deliverable: Tabel komparasi analitik beserta			

Mg Ke-	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)	Penilaian		Bantuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, [Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk	Luring (<i>offline</i>)	Daring (<i>online</i>)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				narasi penjelasan 2-3 halaman (A4, spasi 1,5, font 12), dilengkapi daftar sumber minimal 3 rujukan (termasuk minimal 1 pustaka utama RPS dan 1 sumber data primer KPU/electoral commission negara yang dipilih), dikumpulkan melalui LMS UNISAN paling lambat H-1 sebelum pertemuan Minggu 10			
			Bentuk Penilaian Tes/Unjuk Kerja: Tidak ada tes formatif tersendiri di minggu ini; penilaian utama melalui laporan analisis Proyek Mini yang dinilai menggunakan rubrik dengan empat dimensi: ketajaman analisis data (40%), kedalaman kajian pustaka (25%),	BP — Mekanisme kuliah: Dosen memfasilitasi sesi workshop analisis selama 100 menit: 15 menit pengantar konsep akuntabilitas deskriptif vs substantif (mengaitkan dengan temuan tabel komparasi Minggu 9), 60 menit workshop berpasangan di mana tiap pasang mempresentasikan draf kerangka analisis representasi dan menerima umpan balik terstruktur dari pasang lain serta dosen, 25 menit pleno dan	BP — Mekanisme kuliah: Dosen mengunggah bahan kajian di LMS berupa panduan analisis data komposisi parlemen (cara membaca profil anggota DPR dari situs resmi DPR RI dan DPRD provinsi) serta rubrik penilaian laporan Proyek Mini; dosen membuka sesi konsultasi virtual singkat (30 menit) melalui platform video untuk menjawab pertanyaan terkait metodologi pengumpulan	Bahan Kajian: • Pola rekrutmen anggota parlemen: dimensi deskriptif dan substantif representasi; • Komposisi parlemen kawasan Indonesia Timur berdasarkan data empiris; • Mekanisme akuntabilitas anggota parlemen kepada konstituen;	

Mg Ke-	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)	Penilaian		Bantuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, [Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk	Luring (<i>offline</i>)	Daring (<i>online</i>)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			kualitas kerangka representasi yang dirancang (25%), dan kejelasan penulisan akademik (10%) Partisipasi kelas & laboratorium: Mahasiswa mempresentasikan draf temuan analisis (bukan sekadar membaca teks), merespons pertanyaan rekan dengan argumen berbasis data, dan menunjukkan keterbukaan terhadap kritik sebagai cerminan nilai Harmony dan Integrity ICHSA-N; dosen menilai kualitas interaksi diskusi bukan frekuensi berbicara	penegasan konsep kunci akuntabilitas parlemen kawasan Indonesia Timur (tatap muka di kelas). Mekanisme & materi: Mahasiswa membawa draf kerangka analisis yang telah disiapkan secara daring, menerima umpan balik dari sesama mahasiswa menggunakan rubrik peer-review yang disiapkan dosen, lalu merevisi kerangka tersebut sebagai fondasi laporan akhir Proyek Mini yang dikumpulkan minggu ini MP — Metode Pembelajaran: Project-Based Learning: workshop peer-review draf Proyek Mini dengan umpan balik terstruktur antar-pasang menggunakan rubrik yang transparan, mendorong nilai Harmony dan Service melalui orientasi analisis	data empiris (via LMS; sinkron/asinkron). Mekanisme & materi: Mahasiswa mengakses situs resmi DPR RI dan DPRD provinsi/kabupaten kawasan Indonesia Timur untuk mengumpulkan data profil anggota parlemen (semester berjalan), mengisi lembar kerja analisis yang tersedia di LMS, dan mengunggah draf kerangka analisis representasi sebagai bahan diskusi luring MP — Metode Pembelajaran: Project-Based Learning: mahasiswa memulai pengerjaan Proyek Mini dengan mengumpulkan data primer komposisi parlemen secara mandiri sebelum sesi luring, sehingga diskusi tatap	• Kerangka analisis representasi: menghubungkan desain pemilu dengan kualitas parlemen; Pustaka: Hazan, R. Y., & Rahat, G. (2010); Lijphart, A. (1999); Putnam, R. D. (1993); Budiardjo, M. (2008); Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014.	

Mg Ke-	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)	Penilaian		Bentuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, [Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk	Luring (<i>offline</i>)	Daring (<i>online</i>)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			Tugas: Laporan analisis Proyek Mini representasi dan akuntabilitas parlemen: 4-6 halaman isi (tidak termasuk lampiran data), memuat profil komposisi parlemen berbasis data empiris, analisis akuntabilitas, dan kerangka representasi yang dirancang sendiri oleh mahasiswa; dikerjakan berpasangan (2 mahasiswa)	pada kepentingan masyarakat kawasan Indonesia Timur Estimasi Waktu: PB 3×50' · PT 3×60' · KM 3×60'. Tugas: Pasangan mahasiswa (2 orang) menyusun laporan analisis Proyek Mini yang memuat: (1) profil komposisi anggota DPR atau DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota kawasan Indonesia Timur (dipilih salah satu) berdasarkan data empiris periode legislatif berjalan, mencakup dimensi gender, latar belakang pendidikan, profesi, dan afiliasi partai; (2) evaluasi mekanisme akuntabilitas yang tersedia dan efektivitasnya berdasarkan kriteria teori demokrasi; (3) kerangka analisis representasi orisinal (deskriptif dan substantif) yang menghubungkan desain sistem pemilu (Minggu 9)	muka dapat berfokus pada pendalaman analisis bukan pengumpulan data Estimasi Waktu: PB 3×50' · PT 3×60' · KM 3×60'.		

Mg Ke-	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)	Penilaian		Bantuan Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, [Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk	Luring (offline)	Daring (online)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				dengan komposisi yang ditemukan; laporan harus menyertakan tabel atau grafik data empiris sebagai lampiran dan pernyataan penggunaan AI generatif bila digunakan Deliverable: Laporan analisis tertulis 4-6 halaman isi (A4, spasi 1,5, font 12) beserta lampiran tabel/grafik data komposisi parlemen; mencantumkan minimal 4 rujukan (termasuk minimal 2 pustaka utama RPS); dikumpulkan melalui LMS UNISAN paling lambat akhir Minggu 10 sebagai produk yang akan menjadi bahan rujukan diskusi Minggu 11			
11,12	Sub-CPMK6: Menganalisis dinamika fraksi, koalisi, dan pengaruh partai politik terhadap perilaku legislatif (voting behavior, absensi, inisiatif RUU) anggota DPR atau DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota.	Mahasiswa mampu: Menganalisis fungsi dan mekanisme kerja fraksi di DPR atau DPRD berdasarkan ketentuan Peraturan DPR RI Nomor 1	Bentuk Penilaian Tes/Unjuk Kerja: Tidak ada kuis formatif tersendiri; penilaian melalui	BP — Mekanisme kuliah: Dosen memfasilitasi dua tahap selama 100 menit: (1) 30 menit simulasi mini sidang fraksi—kelompok mahasiswa memerankan fraksi-fraksi dengan posisi	BP — Mekanisme kuliah: Dosen mengunggah bahan bacaan terpilih di LMS dan modul panduan analisis rekaman sidang parlemen (cara membaca risalah sidang dan	Bahan Kajian: Fungsi dan mekanisme kerja fraksi di DPR dan DPRD berdasarkan regulasi;	14

Mg Ke-	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)	Penilaian		Bantuan Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, [Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk	Luring (offline)	Daring (online)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		Tahun 2020 dan membandingkannya dengan praktik aktual yang terdokumentasi • Mengidentifikasi pola pembentukan koalisi pemerintahan dan oposisi di parlemen Indonesia serta menghubungkannya dengan perilaku voting anggota DPR atau DPRD pada isu-isu legislatif tertentu • Membedakan faktor-faktor yang memengaruhi perilaku legislatif anggota parlemen (disiplin fraksi, kepentingan konstituen, lobi kelompok kepentingan, dan preferensi individual) berdasarkan bukti empiris dari rekaman sidang atau laporan kinerja parlemen	lembar kerja analisis kasus voting behavior yang dikerjakan dalam kelompok selama sesi luring, dinilai berdasarkan ketepatan identifikasi faktor penjabar perilaku legislatif dan konsistensi argumen dengan data yang tersedia (rekaman sidang atau laporan DPR/DPRD) Partisipasi kelas & laboratorium: Mahasiswa aktif dalam simulasi sidang fraksi (role-play singkat): menyampaikan posisi fraksi secara argumentatif, bernegosiasi	berbeda pada satu isu legislatif hipotetikal yang relevan dengan kawasan Indonesia Timur, lalu berdebat dan mengambil keputusan voting; (2) 50 menit debriefing analitik: dosen memandu diskusi pleno yang mengurai faktor-faktor di balik keputusan voting dalam simulasi dan membandingkannya dengan kasus nyata yang dianalisis secara daring; (3) 20 menit penyimpulan dan arahan penugasan memo analisis individual (tatap muka di kelas). Mekanisme & materi: Mahasiswa membawa catatan analisis dari forum daring, berpartisipasi dalam simulasi sidang dengan argumen yang disiapkan berbasis bacaan, dan menggunakan lembar kerja analisis perilaku legislatif yang disediakan dosen untuk mencatat	laporan voting DPR dari situs resmi); dosen membuat forum diskusi asinkron dengan studi kasus: analisis keputusan fraksi-fraksi DPR pada satu RUU kontroversial yang dipublikasikan—mahasiswa diminta mengidentifikasi pola koalisi dan antisipasi voting sebelum sesi luring (via LMS; sinkron/asinkron). Mekanisme & materi: Mahasiswa mengakses rekaman atau risalah sidang DPR dari JDIH DPR RI, membaca Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 (pasal tentang fraksi), dan mengunggah respons analisis forum diskusi minimal 200 kata yang menghubungkan temuan dari laporan Proyek Mini Minggu 10 (komposisi parlemen) dengan dinamika fraksi yang	• Pembentukan koalisi pemerintahan dan oposisi di parlemen Indonesia; • Faktor-faktor penjabar perilaku legislatif: disiplin fraksi, kepentingan konstituen, dan lobi; • Inisiatif RUU dan absensi sebagai indikator kinerja legislatif anggota parlemen; Pustaka: Hazan, R. Y., & Rahat, G. (2010); Lijphart, A. (1999); Budiardjo, M. (2008); Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014; Asshiddiqie, J. (2010).	

Mg Ke-	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)	Penilaian		Bentuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, [Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk	Luring (<i>offline</i>)	Daring (<i>online</i>)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		Menilai sejauh mana pengaruh partai politik melalui fraksi dapat membatasi atau mendorong inisiatif RUU oleh anggota DPR atau DPRD kawasan Indonesia Timur	dengan fraksi lain secara santun, dan menghormati perbedaan pandangan sebagai cerminan nilai Harmony dan Integrity ICHSA-N; dosen menilai kualitas argumentasi dan kemampuan bernegosiasi Tugas: Memo analisis perilaku legislatif: tiap individu menulis memo analitik 2-3 halaman yang menjelaskan faktor dominan di balik satu keputusan voting atau absensi anggota DPR/DPRD yang dipilih dari sumber terbuka (rekaman sidang	temuan debriefing sebagai bahan penulisan memo individual MP — Metode Pembelajaran: Case-Based Learning dengan simulasi peran (role-play sidang fraksi): mendorong pemahaman mendalam tentang dinamika negosiasi koalisi dan mekanisme disiplin fraksi melalui pengalaman langsung yang kemudian didebrief secara analitik Estimasi Waktu: PB 3×50' · PT 3×60' · KM 3×60'. Tugas: Mahasiswa secara individu menulis memo analisis perilaku legislatif berdasarkan satu peristiwa voting, absensi massal, atau keputusan fraksi pada sidang DPR atau DPRD yang dapat diverifikasi dari sumber terbuka (risalah sidang JDIH DPR	diamati MP — Metode Pembelajaran: Case-Based Learning: mahasiswa menganalisis kasus nyata perilaku voting fraksi-fraksi DPR atau DPRD sebelum sesi tatap muka, sehingga diskusi luring dapat langsung masuk ke tahap evaluasi dan perbandingan temuan antar-mahasiswa Estimasi Waktu: PB 3×50' · PT 3×60' · KM 3×60'.		

Mg Ke-	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)	Penilaian		Bentuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, [Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk	Luring (<i>offline</i>)	Daring (<i>online</i>)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			JDIH DPR RI atau media massa terverifikasi)	RI, siaran pers resmi, atau pemberitaan media terverifikasi); memo harus mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi keputusan tersebut (disiplin fraksi, koalisi pemerintahan, kepentingan konstituen, atau lobi eksternal), mengevaluasi implikasinya terhadap kualitas legislasi, dan bila relevan mengaitkan dengan konteks kawasan Indonesia Timur; mahasiswa wajib menyertakan pernyataan penggunaan AI generatif bila digunakan Deliverable: Memo analisis tertulis 2-3 halaman (A4, spasi 1,5, font 12) dengan minimal 3 rujukan (termasuk Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 sebagai sumber primer dan minimal 1 pustaka utama RPS), dilengkapi tautan atau lampiran sumber primer yang dirujuk;			

Mg Ke-	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)	Penilaian		Bantuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, [Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk	Luring (<i>offline</i>)	Daring (<i>online</i>)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				dikumpulkan melalui LMS UNISAN paling lambat H-1 sebelum pertemuan Minggu 12			
			Bentuk Penilaian Tes/Unjuk Kerja: Tidak ada tes formatif tersendiri; penilaian utama melalui laporan evaluasi kinerja legislatif yang dinilai menggunakan rubrik empat dimensi: validitas instrumen evaluasi yang dikembangkan (30%), ketepatan penerapan instrumen pada data empiris (30%), kualitas integrasi temuan lintas-minggu 9-11 (25%), dan kelayakan	BP — Mekanisme kuliah: Dosen memfasilitasi sesi presentasi dan peer-evaluation selama 100 menit: tiap kelompok mempresentasikan draf instrumen evaluasi dan temuan awal penerapannya (5-7 menit), kelompok lain memberikan umpan balik terstruktur menggunakan lembar peer-review (15 menit total untuk diskusi), kemudian dosen memberikan umpan balik konsolidatif yang menegaskan standar metodologis evaluasi kinerja parlemen; sesi ditutup dengan diskusi pleno tentang implikasi temuan kelompok-kelompok terhadap akuntabilitas parlemen kawasan Indonesia Timur	BP — Mekanisme kuliah: Dosen mengunggah template instrumen evaluasi kinerja legislatif (kerangka dasar yang dapat dimodifikasi kelompok) dan panduan pengumpulan data empiris fraksi dari sumber terbuka di LMS; dosen membuka forum diskusi asinkron untuk konsultasi metodologi pengembangan instrumen dan menjawab pertanyaan kelompok secara tertulis sebelum sesi luring (via LMS; sinkron/asinkron). Mekanisme & materi: Kelompok mengakses data kinerja fraksi dari situs resmi DPR RI atau DPRD yang dipilih	Bahan Kajian: • Pengembangan instrumen evaluasi kinerja legislatif fraksi: operasionalisasi indikator; • Data empiris kinerja fraksi: kehadiran, inisiatif RUU, dan konsistensi voting; • Akuntabilitas partai politik melalui fraksi kepada konstituen; • Integrasi analisis sistem pemilu, komposisi parlemen, dan perilaku legislatif; • Rekomendasi penguatan akuntabilitas parlemen kawasan Indonesia Timur;	

Mg Ke-	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)	Penilaian		Bantuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, [Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk	Luring (<i>offline</i>)	Daring (<i>online</i>)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			rekomendasi berbasis bukti (15%) Partisipasi kelas & laboratorium: Mahasiswa mempresentasikan laporan evaluasi dalam forum presentasi mini (5-7 menit per kelompok): menyampaikan temuan secara ringkas, menerima pertanyaan kritis dari rekan dan dosen, dan merespons dengan argumen berbasis data; dosen menilai kemampuan mempertahankan argumen secara jujur dan terbuka terhadap kritik (nilai Integrity dan Adaptability	(tatap muka di kelas). Mekanisme & materi: Kelompok membawa draf laporan evaluasi yang telah dikerjakan secara daring, mempresentasikan menggunakan perangkat presentasi, menerima umpan balik peer-review dan dosen, lalu merevisi laporan sesuai masukan untuk dikumpulkan sebagai produk final; mahasiswa mengintegrasikan seluruh temuan dari Minggu 9-11 ke dalam laporan final MP — Metode Pembelajaran: Project-Based Learning dengan presentasi dan peer-evaluation: mendorong internalisasi nilai Nationalism melalui kesadaran bahwa evaluasi kinerja parlemen adalah tanggung jawab warga negara terdidik terhadap	(laporan kinerja, rekaman absensi, dan daftar RUU inisiatif), mengunduh template instrumen, berdiskusi secara daring dalam kelompok untuk menyepakati indikator yang akan dioperasionalkan, dan mengunggah draf instrumen evaluasi ke LMS untuk mendapat umpan balik dosen sebelum sesi tatap muka MP — Metode Pembelajaran: Project-Based Learning: kelompok mengembangkan instrumen evaluasi kinerja legislatif sebagai produk nyata yang akan diterapkan pada data empiris, mendorong kreativitas analisis (nilai Creativity ICHSA-N) dalam mengoperasionalkan konsep akuntabilitas	Pustaka: Hazan, R. Y., & Rahat, G. (2010); Lijphart, A. (1999); Putnam, R. D. (1993); Budiardjo, M. (2008); Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014; Farida, M. (2021); Asshiddiqie, J. (2010).	

Mg Ke-	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)	Penilaian		Bentuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, [Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk	Luring (<i>offline</i>)	Daring (<i>online</i>)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			ICHSA-N) Tugas: Laporan evaluasi kinerja legislatif fraksi: 5-7 halaman isi (tidak termasuk lampiran), memuat instrumen evaluasi orisinal, penerapan instrumen pada data empiris satu fraksi pilihan, temuan analisis terintegrasi, dan rekomendasi; dikerjakan berkelompok (3-4 mahasiswa)	penguatan demokrasi Indonesia Estimasi Waktu: PB 3×50' · PT 3×60' · KM 3×60'. Tugas: Kelompok (3-4 mahasiswa) menyusun laporan evaluasi kinerja legislatif fraksi yang terdiri dari: (1) instrumen evaluasi orisinal dengan minimal 4 indikator terukur yang dioperasionalkan secara eksplisit; (2) penerapan instrumen pada data empiris kinerja minimal satu fraksi DPR atau DPRD kawasan Indonesia Timur (periode legislatif berjalan atau satu periode sebelumnya); (3) analisis terintegrasi yang menghubungkan temuan dengan desain sistem pemilu (Minggu 9), komposisi parlemen (Minggu 10), dan dinamika fraksi-koalisi (Minggu 11); (4)	fraksi Estimasi Waktu: PB 3×50' · PT 3×60' · KM 3×60'.		

Mg Ke-	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)	Penilaian		Bentuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, [Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk	Luring (<i>offline</i>)	Daring (<i>online</i>)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				rekomendasi berbasis bukti untuk penguatan akuntabilitas fraksi kepada konstituen; laporan harus menyertakan lampiran data empiris yang digunakan dan pernyataan pembagian kerja anggota kelompok serta pernyataan penggunaan AI generatif bila digunakan Deliverable: Laporan evaluasi kinerja legislatif fraksi 5-7 halaman isi (A4, spasi 1,5, font 12) beserta lampiran data empiris; mencantumkan minimal 5 rujukan (termasuk minimal 2 pustaka utama RPS, Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020, dan sumber data primer fraksi yang dievaluasi); dikumpulkan melalui LMS UNISAN paling lambat tiga hari setelah pertemuan Minggu 12 sebagai produk integratif blok Sub-CPMK 5-6			

Mg Ke-	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)	Penilaian		Bantuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, [Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk	Luring (<i>offline</i>)	Daring (<i>online</i>)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
13,14	Sub-CPMK7: Mengevaluasi kualitas representasi parlemen (keterwakilan gender, wilayah, dan kelompok marjinal) dan akuntabilitas anggota terhadap konstituen dengan menggunakan data empiris partisipasi masyarakat serta kajian komparatif minimal 2 negara atau dua tingkatan parlemen.	Mahasiswa mampu: • Menganalisis tingkat keterwakilan gender dalam komposisi DPR dan DPRD berdasarkan data empiris periode pascareformasi menggunakan indikator kuantitatif yang terukur • Menganalisis keterwakilan wilayah dan kelompok marjinal di DPR dan DPD dengan membandingkan proporsi kursi terhadap proporsi populasi di kawasan Indonesia Timur • Membandingkan mekanisme akuntabilitas anggota parlemen terhadap konstituen antara minimal dua negara atau dua tingkatan parlemen berdasarkan data dan literatur yang	Bentuk Penilaian Tes/Unjuk Kerja: Tidak ada tes formal minggu ini; evaluasi dilakukan melalui kualitas analisis tertulis dan diskusi kelompok yang menunjukkan kemampuan menganalisis data empiris (C4) serta membandingkan antar-kasus (C5) Partisipasi kelas & laboratorium: Keaktifan dalam diskusi kelompok dinilai dari: (a) kedalaman argumen berbasis data, bukan opini; (b) kemampuan menghubungkan temuan kawasan	BP — Mekanisme kuliah: Dosen membuka sesi dengan pemaparan singkat (15 menit) tentang kerangka evaluasi representasi dan akuntabilitas, kemudian memfasilitasi diskusi kelompok kecil (3-4 mahasiswa) yang masing-masing mempresentasikan temuan kasus komparatif mereka; dosen memberikan umpan balik terstruktur berbasis rubrik di akhir sesi (tatap muka di kelas). Mekanisme & materi: Mahasiswa mempresentasikan ringkasan temuan awal dalam kelompok, mendiskusikan perbedaan antarkasus, dan menyempurnakan argumen evaluatif berdasarkan masukan rekan dan dosen sebelum menulis laporan	BP — Mekanisme kuliah: Dosen mengunggah video penjelasan konsep representasi formal vs. substantif dan tipologi akuntabilitas (vertikal/horizontal) berdurasi 20-25 menit ke LMS, disertai panduan penelusuran data keterwakilan dari situs resmi DPR RI, BPS, dan basis data komparatif IPU Parline (via LMS; sinkron/asinkron). Mekanisme & materi: Mahasiswa mengunduh bahan bacaan dari LMS, menelusuri data komposisi DPR periode 2019-2024 dan DPRD kawasan Indonesia Timur, lalu menyiapkan satu halaman ringkasan temuan awal sebelum sesi luring; penggunaan Generative AI hanya untuk asistensi kerangka	Bahan Kajian: • Representasi formal dan substantif dalam parlemen: konsep dan indikator pengukuran; • Data keterwakilan gender, wilayah, dan kelompok marjinal di DPR dan DPRD Indonesia; • Mekanisme akuntabilitas vertikal dan horizontal anggota parlemen terhadap konstituen; • Kajian komparatif sistem representasi: Indonesia dan negara pembanding; Pustaka: Hazan, R. Y., & Rahat, G. (2010); Lijphart, A. (1999); Budiardjo, M. (2008); Asshiddiqie, J. (2006); Undang-Undang	14

Mg Ke-	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)	Penilaian		Bantuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, [Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk	Luring (<i>offline</i>)	Daring (<i>online</i>)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		sahih • Mengevaluasi kesenjangan antara representasi formal dan representasi substantif menggunakan kerangka teoritis yang relevan • Menyajikan temuan analisis komparatif secara sistematis dengan argumen berbasis data dan referensi pustaka yang dicantumkan secara berintegritas	Indonesia Timur dengan kerangka teori; (c) etika diskusi yang menghargai perspektif berbeda (nilai Harmony ICHSA-N); minimal berkontribusi dua kali dalam sesi Tugas: Laporan analisis komparatif representasi dan akuntabilitas parlemen: minimal 1.200 kata, mencakup tabel data keterwakilan, perbandingan dua kasus, argumen evaluatif, dan daftar referensi format APA; dikumpulkan melalui LMS e-learning.unisan.ac.id paling lambat	akhir MP — Metode Pembelajaran: Case-Based Learning: diskusi kelompok kecil menggunakan kasus keterwakilan perempuan di DPR RI dan DPRD Provinsi Papua/Maluku sebagai kasus utama, dibandingkan dengan data negara lain, untuk melatih kemampuan mengevaluasi kesenjangan representasi secara kritis (nilai Integrity dan Service ICHSA-N) Estimasi Waktu: PB 3×50' · PT 3×60' · KM 3×60'. Tugas: Mahasiswa secara individual menyusun laporan analisis komparatif yang mengevaluasi kualitas representasi parlemen Indonesia dari dimensi gender, wilayah, dan kelompok marjinal. Laporan harus	argumen dengan kewajiban deklarasi tertulis MP — Metode Pembelajaran: Case-Based Learning: mahasiswa menganalisis kasus nyata komposisi parlemen Indonesia dan membandingkannya dengan satu negara lain dari bacaan Hazan & Rahat (2010) atau Lijphart (1999) secara mandiri daring sebelum dibahas bersama Estimasi Waktu: PB 3×50' · PT 3×60' · KM 3×60'.	Nomor 17 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019.	

Mg Ke-	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)	Penilaian		Bentuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, [Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk	Luring (<i>offline</i>)	Daring (<i>online</i>)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			7 hari setelah perkuliahan	menyertakan tabel data kuantitatif keterwakilan, membandingkan dengan minimal satu negara lain atau satu tingkatan parlemen berbeda, menggunakan konsep representasi formal vs. substantif, dan menyimpulkan evaluasi kesenjangan akuntabilitas. Penggunaan data dari JDIH DPR RI, situs KPU, dan sumber resmi lainnya wajib dikutip. Jika menggunakan Generative AI, mahasiswa wajib melampirkan pernyataan penggunaan sesuai Pedoman UNISAN. Deliverable: Laporan analisis komparatif tertulis minimal 1.200 kata (tidak termasuk tabel dan daftar referensi) berformat dokumen Word atau PDF, diunggah ke LMS e-learning.unisan.ac.id; wajib menyertakan: (1) tabel data keterwakilan, (2) narasi perbandingan dua			

Mg Ke-	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)	Penilaian		Bentuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, [Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk	Luring (<i>offline</i>)	Daring (<i>online</i>)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				kasus, (3) evaluasi kesenjangan berbasis teori, (4) daftar referensi format APA, dan (5) pernyataan penggunaan AI bila relevan			
			Bentuk Penilaian Tes/Unjuk Kerja: Tidak ada tes formal; evaluasi dilakukan melalui presentasi kelompok yang mengukur kemampuan mengintegrasikan analisis representasi (minggu ke-13) dengan analisis partisipasi (minggu ke-14) secara koheren (C5-C6), dinilai menggunakan rubrik presentasi yang mencakup kedalaman argumen,	BP — Mekanisme kuliah: Dosen membuka dengan sintesis singkat (10 menit) yang menghubungkan konsep partisipasi masyarakat, modal sosial, dan akuntabilitas parlemen, kemudian memfasilitasi presentasi kelompok (masing-masing 10-12 menit) yang memaparkan peta masalah sementara mereka; dosen dan mahasiswa lain memberikan umpan balik terstruktur menggunakan lembar evaluasi sejawat (tatap muka di kelas). Mekanisme & materi: Setiap kelompok mempresentasikan peta masalah representasi dan	BP — Mekanisme kuliah: Dosen mengunggah bahan bacaan tentang partisipasi masyarakat dalam legislasi dan konsep modal sosial ke LMS, disertai panduan penelusuran rekaman rapat dengar pendapat umum (RDPU) DPR RI via situs resmi DPR atau kanal resmi YouTube DPR, serta instruksi penyusunan peta masalah (via LMS; sinkron/asinkron). Mekanisme & materi: Mahasiswa menelaah minimal satu rekaman RDPU atau naskah akademik RUU yang melibatkan masyarakat,	Bahan Kajian: • Mekanisme partisipasi masyarakat dalam proses legislasi: rapat dengar pendapat umum dan konsultasi publik; • Modal sosial, kepercayaan publik, dan akuntabilitas parlemen; • Pola partisipasi masyarakat kawasan Indonesia Timur dalam legislasi daerah; • Integrasi representasi dan akuntabilitas: peta masalah sebagai dasar rekomendasi kebijakan; Pustaka:	

Mg Ke-	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)	Penilaian		Bantuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, [Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk	Luring (<i>offline</i>)	Daring (<i>online</i>)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			penggunaan data, dan relevansi rekomendasi awal Partisipasi kelas & laboratorium: Keaktifan dinilai dari: (a) kontribusi substantif dalam sesi presentasi kelompok; (b) kemampuan memberikan umpan balik kritis yang konstruktif kepada kelompok lain; (c) ketepatan mengaitkan argumen dengan konteks kawasan Indonesia Timur (nilai Service ICHSA-N); minimal memberikan satu umpan balik tertulis kepada kelompok lain via LMS	akuntabilitas, menerima umpan balik, dan mendokumentasikan revisi yang diperlukan sebelum menyempurnakan draf untuk mendukung penulisan policy brief MP — Metode Pembelajaran: Project-Based Learning: presentasi kelompok kecil dengan umpan balik sejawat (peer review) terstruktur; konteks kasus diarahkan pada parlemen daerah di kawasan Indonesia Timur untuk menguatkan nilai Nationalism dan Service ICHSA-N melalui orientasi analisis yang berdampak nyata bagi warga daerah Estimasi Waktu: PB 3×50' · PT 3×60' · KM 3×60'. Tugas: Mahasiswa secara kelompok (3-4 orang)	mengidentifikasi pola partisipasi, dan mengunggah catatan analisis singkat (300-400 kata) ke forum diskusi LMS sebelum sesi luring; anggota kelompok saling memberi komentar di forum MP — Metode Pembelajaran: Project-Based Learning: mahasiswa dalam kelompok mulai menyusun draf peta masalah representasi dan akuntabilitas berbasis temuan dua minggu sebagai bagian dari proyek analisis semester yang bermuara pada policy brief minggu ke-15 Estimasi Waktu: PB 3×50' · PT 3×60' · KM 3×60'.	Putnam, R. D. (1993); Hazan, R. Y., & Rahat, G. (2010); Asshiddiqie, J. (2010); Farida, M. (2021); Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019.	

Mg Ke-	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)	Penilaian		Bentuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, [Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk	Luring (<i>offline</i>)	Daring (<i>online</i>)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			Tugas: Revisi dan pengembangan laporan minggu ke-13 menjadi draf peta masalah representasi dan akuntabilitas parlemen: minimal 1.500 kata (kumulatif atau dokumen terpisah), mencakup sintesis temuan dua minggu, analisis partisipasi masyarakat, dan peta masalah terstruktur sebagai fondasi policy brief minggu ke-15; dikumpulkan melalui LMS	menyusun peta masalah representasi dan akuntabilitas parlemen yang mengintegrasikan: (1) temuan analisis keterwakilan dan mekanisme akuntabilitas dari minggu ke-13, (2) analisis mekanisme partisipasi masyarakat dalam legislasi berdasarkan UU No. 12 Tahun 2011 beserta perubahannya, dan (3) penilaian atas peran modal sosial berdasarkan perspektif Putnam. Peta masalah harus menyertakan kasus dari kawasan Indonesia Timur dan menjadi fondasi penulisan policy brief individual pada minggu ke-15. Dokumen ini juga berfungsi sebagai bahan presentasi kelompok dalam sesi luring. Deliverable: Dokumen peta masalah representasi dan akuntabilitas parlemen minimal 1.500 kata			

Mg Ke-	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)	Penilaian		Bantuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, [Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk	Luring (<i>offline</i>)	Daring (<i>online</i>)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				(format Word/PDF) ditambah slide presentasi (8-12 halaman), diunggah ke LMS oleh ketua kelompok; dokumen wajib memuat: (1) identifikasi masalah representasi berbasis data, (2) analisis mekanisme partisipasi masyarakat, (3) penilaian akuntabilitas komparatif, (4) implikasi untuk kawasan Indonesia Timur, dan (5) daftar referensi format APA			
15	Sub-CPMK8: Merumuskan rekomendasi penguatan fungsi parlemen yang berbasis kajian empiris dan komparatif, disajikan dalam policy brief tertulis minimal 1.500 kata yang ditujukan kepada pemangku kepentingan relevan (DPR, DPRD, atau KPU).	Mahasiswa mampu: - Merumuskan rekomendasi penguatan fungsi parlemen yang spesifik, terukur, dan berbasis kajian empiris serta komparatif yang telah dibangun sepanjang semester - Menyusun policy brief tertulis minimal 1.500 kata dengan struktur baku (ringkasan eksekutif,	Bentuk Penilaian Tes/Unjuk Kerja: Tidak ada tes tertulis formal; evaluasi utama adalah kualitas policy brief sebagai produk akhir yang mengukur kemampuan merumuskan rekomendasi (C6) dan menilai	BP — Mekanisme kuliah: Dosen memfasilitasi sesi presentasi policy brief dalam format sidang simulasi (simulated policy hearing): setiap mahasiswa atau kelompok kecil mempresentasikan policy brief selama 8-10 menit, diikuti sesi tanya jawab 5-7 menit oleh dosen dan dua mahasiswa pembahas yang ditunjuk bergiliran; dosen menyampaikan umpan balik terstruktur	BP — Mekanisme kuliah: Dosen mengunggah template dan panduan penulisan policy brief berbasis standar akademik dan praktik kelembagaan (format yang lazim digunakan lembaga think tank dan parlemen) ke LMS, disertai contoh policy brief publik dari sumber resmi untuk dijadikan referensi struktur penulisan (via LMS;	Bahan Kajian: - Teknik penulisan policy brief untuk pemangku kepentingan parlemen: struktur, bahasa, dan orientasi rekomendasi; - Sintesis kajian representasi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat sebagai basis rekomendasi kebijakan;	7

Mg Ke-	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)	Penilaian		Bantuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, [Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk	Luring (<i>offline</i>)	Daring (<i>online</i>)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		latar belakang masalah, analisis opsi kebijakan, rekomendasi, dan kesimpulan) yang ditujukan kepada pemangku kepentingan relevan • Mengintegrasikan perspektif hukum tata negara dan ilmu politik empiris secara koheren dalam satu dokumen kebijakan yang dapat digunakan oleh pemangku kepentingan • Menilai implikasi rekomendasi terhadap penguatan representasi dan akuntabilitas parlemen di kawasan Indonesia Timur secara kritis dan berorientasi kepentingan publik • Mempresentasikan policy brief secara lisan dengan argumen yang terstruktur, berbasis data, dan	implikasi kebijakan (C5), dinilai menggunakan rubrik policy brief yang mencakup: kejelasan masalah, kedalaman analisis empiris, kualitas rekomendasi (spesifik dan dapat diimplementasikan), koherensi argumen, serta kesesuaian format dan tata bahasa Partisipasi kelas & laboratorium: Keaktifan dalam sesi presentasi dan tanya-jawab dinilai dari: (a) kemampuan mempertahankan argumen rekomendasi dengan bukti; (b)	menggunakan rubrik penilaian yang telah dibagikan sebelumnya (tatap muka di kelas). Mekanisme & materi: Mahasiswa mempersiapkan presentasi lisan, berperan sebagai pembahas bagi rekan yang presentasi, dan mencatat masukan untuk penyempurnaan dokumen final; sesi dirancang menyerupai forum konsultasi publik parlemen sebagai latihan orientasi pengabdian publik MP — Metode Pembelajaran: Project-Based Learning dengan simulasi sidang kebijakan (policy hearing simulation): format ini melatih kemampuan advokasi berbasis bukti, komunikasi publik, dan orientasi Service serta Adaptability ICHSA-N	sinkron/asinkron). Mekanisme & materi: Mahasiswa menyusun draf policy brief secara mandiri berbasis peta masalah dari minggu ke-14, mengunggah draf ke LMS untuk mendapat umpan balik sejawat atau umpan balik dosen sebelum versi final; penggunaan Generative AI hanya untuk asistensi penyempurnaan bahasa dan kerangka, dengan deklarasi penggunaan wajib sesuai Pedoman UNISAN (nilai Integrity ICHSA-N) MP — Metode Pembelajaran: Project-Based Learning: penyelesaian produk kebijakan nyata sebagai puncak proyek analisis parlemen semester ini; mahasiswa berperan sebagai analis kebijakan	• Opsi penguatan fungsi parlemen: legislasi, pengawasan, dan keterwakilan di konteks Indonesia; • Implikasi rekomendasi kebijakan bagi kawasan Indonesia Timur; Pustaka: Norton, P. (2013); Lijphart, A. (1999); Asshiddiqie, J. (2006); Asshiddiqie, J. (2010); Budiardjo, M. (2008); Farida, M. (2021); Putnam, R. D. (1993); Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022.	

Mg Ke-	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)	Penilaian		Bantuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, [Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk	Luring (<i>offline</i>)	Daring (<i>online</i>)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		responsif terhadap pertanyaan pembahas	responsivitas terhadap pertanyaan kritis pembahas; (c) sikap terbuka terhadap perspektif berbeda (nilai Harmony ICHSA-N); (d) orientasi rekomendasi terhadap kepentingan publik dan warga kawasan Indonesia Timur (nilai Service dan Nationalism ICHSA-N) Tugas: Policy brief individual tertulis minimal 1.500 kata (tidak termasuk daftar referensi), ditujukan kepada DPR RI, DPRD tingkat provinsi atau	dalam konteks praktis kelembagaan parlemen Estimasi Waktu: PB 3×50' · PT 3×60' · KM 3×60'. Tugas: Mahasiswa secara individual menyusun policy brief yang merumuskan rekomendasi penguatan fungsi parlemen berdasarkan seluruh kajian empiris dan komparatif yang telah dilakukan sepanjang semester. Policy brief harus mencakup: (1) ringkasan eksekutif maksimal 200 kata, (2) latar belakang masalah berbasis data, (3) analisis minimal dua opsi kebijakan beserta kelebihan dan keterbatasannya, (4) rekomendasi spesifik yang dapat diimplementasikan oleh lembaga yang dituju, dan (5) implikasi khusus bagi kawasan Indonesia Timur. Dokumen ditujukan secara eksplisit	yang menghasilkan dokumen yang dapat digunakan pemangku kepentingan riil Estimasi Waktu: PB 3×50' · PT 3×60' · KM 3×60'.		

Mg Ke-	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)	Penilaian		Bantuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, [Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk	Luring (<i>offline</i>)	Daring (<i>online</i>)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			kabupaten/kota di kawasan Indonesia Timur, atau KPU; dikumpulkan melalui LMS disertai slide presentasi 10-15 halaman; batas waktu pengumpulan dokumen tertulis: 3 hari sebelum sesi luring presentasi	kepada salah satu pemangku kepentingan: DPR RI, DPRD provinsi atau kabupaten/kota di kawasan Indonesia Timur, atau KPU. Penggunaan Generative AI wajib dideklarasikan. Deliverable: Policy brief tertulis final minimal 1.500 kata (tidak termasuk daftar referensi) dalam format Word atau PDF, diunggah ke LMS e-learning.unisan.ac.id; disertai slide presentasi 10-15 halaman (PowerPoint atau setara); wajib memuat: (1) ringkasan eksekutif, (2) latar belakang berbasis data, (3) analisis opsi kebijakan, (4) rekomendasi spesifik dan terukur, (5) implikasi kawasan Indonesia Timur, (6) daftar referensi format APA, dan (7) pernyataan penggunaan AI bila relevan			

Mg Ke-	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)	Penilaian		Bentuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, [Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk	Luring (<i>offline</i>)	Daring (<i>online</i>)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
16		Mahasiswa mampu: • Menunjukkan penguasaan seluruh capaian pembelajaran mata kuliah melalui jawaban ujian yang sistematis, berbasis argumen empiris, dan mengintegrasikan konsep-konsep utama studi parlemen • Menganalisis kasus atau permasalahan parlemen yang diberikan dalam soal dengan menggunakan kerangka teori dan data yang relevan secara mandiri dan jujur • Mengevaluasi fungsi parlemen secara kritis dengan mengaitkan dimensi normatif (hukum tata negara) dan empiris (praktik kelembagaan) secara koheren dalam jawaban tertulis	Bentuk Penilaian Tes/Unjuk Kerja: Ujian Akhir Semester tertulis yang menguji integrasi seluruh kompetensi Studi Parlemen: soal berbentuk esai analitis atau studi kasus yang mengukur kemampuan analisis (C4), evaluasi (C5), dan perumusan argumen berbasis bukti (C6); penilaian berdasarkan rubrik yang mencakup kedalaman analisis, ketepatan penggunaan konsep, koherensi argumen, dan kejujuran akademik (nilai	BP — Mekanisme kuliah: Dosen mengawasi pelaksanaan Ujian Akhir Semester sesuai jadwal resmi UNISAN; ujian dilaksanakan secara tertulis di ruang yang ditetapkan dengan tata tertib akademik yang berlaku (tatap muka di kelas). Mekanisme & materi: Mahasiswa mengerjakan soal UAS secara mandiri dan berintegritas; soal dirancang untuk mengukur kemampuan integratif menganalisis dan mengevaluasi sistem parlemen Indonesia dalam konteks komparatif MP — Metode Pembelajaran: Ujian sumatif tertulis individual sebagai evaluasi akhir ketercapaian CPMK	BP — Mekanisme kuliah: Tidak ada sesi kuliah daring; dosen memastikan semua nilai tugas dan penilaian formatif telah diunggah ke SI-OBE UNISAN sebelum UAS, dan memberikan informasi teknis pelaksanaan ujian melalui LMS (via LMS; sinkron/asinkron). Mekanisme & materi: Mahasiswa melakukan revidi mandiri seluruh materi semester menggunakan bahan yang telah tersedia di LMS e-learning.unisan.ac.id, termasuk rekaman kuliah, bahan bacaan, dan umpan balik tugas yang telah diterima sepanjang semester	Bahan Kajian: • Integrasi seluruh bahan kajian semester: konsep dasar parlemen, struktur dan kewenangan lembaga perwakilan, fungsi legislasi dan pengawasan, relasi antarlembaga, proses pembentukan undang-undang, representasi dan akuntabilitas, partisipasi masyarakat, dan tata kelola parlemen daerah; Pustaka: Norton, P. (2013); Lijphart, A. (1999); Asshiddiqie, J. (2006); Asshiddiqie, J. (2010); Budiardjo, M. (2008); Hazan, R. Y., & Rahat, G. (2010); Putnam, R. D. (1993); Farida, M. (2021); Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor	—

Mg Ke-	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)	Penilaian		Bantuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, [Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk	Luring (offline)	Daring (online)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			Integrity ICHSA-N) Partisipasi kelas & laboratorium: Mahasiswa hadir tepat waktu, mengerjakan ujian secara mandiri tanpa pelanggaran integritas akademik, dan menyelesaikan seluruh soal dalam batas waktu yang ditetapkan; kepatuhan terhadap tata tertib ujian dinilai sebagai bagian dari profil sikap mahasiswa Tugas: Tidak ada tugas tambahan; UAS adalah evaluasi sumatif akhir	mata kuliah Studi Parlemen Estimasi Waktu: PB 3×50' · PT 3×60' · KM 3×60'. Tugas: Tidak ada penugasan terstruktur di luar ujian; mahasiswa menyelesaikan Ujian Akhir Semester sebagai puncak evaluasi sumatif yang mengintegrasikan seluruh kompetensi analisis parlemen yang telah dibangun sejak minggu pertama. Nilai UAS, bersama nilai UTS dan tugas-tugas sepanjang semester, direkam dalam SI-OBE UNISAN untuk pelaporan ketercapaian CPL-03 dan CPL-06. Deliverable: Lembar jawaban UAS tertulis yang diselesaikan dalam sesi ujian resmi sesuai jadwal UNISAN; tidak ada dokumen tambahan yang dikumpulkan pasca ujian	MP — Metode Pembelajaran: Reviu mandiri berbasis LMS sebagai persiapan ujian sumatif integratif Estimasi Waktu: PB 3×50' · PT 3×60' · KM 3×60'.	13 Tahun 2019; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022; Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020.	

Mg Ke-	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)	Penilaian		Bantuan Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, [Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk	Luring (<i>offline</i>)	Daring (<i>online</i>)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			semester yang mengukur ketercapaian seluruh Sub-CPMK secara integratif				

Catatan :

1. **Capaian Pembelajaran Lulusan PRODI (CPL-PRODI)** adalah kemampuan yang dimiliki oleh setiap lulusan PRODI yang merupakan internalisasi dari sikap, penguasaan pengetahuan dan ketrampilan sesuai dengan jenjang prodinya yang diperoleh melalui proses pembelajaran.
2. **CPL yang dibebankan pada mata kuliah** adalah beberapa capaian pembelajaran lulusan program studi (CPL-PRODI) yang digunakan untuk pembentukan/pengembangan sebuah mata kuliah yang terdiri dari aspek sikap, ketrampilan umum, ketrampilan khusus dan pengetahuan.
3. **CP Mata kuliah (CPMK)** adalah kemampuan yang dijabarkan secara spesifik dari CPL yang dibebankan pada mata kuliah, dan bersifat spesifik terhadap bahan kajian atau materi pembelajaran mata kuliah tersebut.
4. **Sub-CP Mata kuliah (Sub-CPMK)** adalah kemampuan yang dijabarkan secara spesifik dari CPMK yang dapat diukur atau diamati dan merupakan kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran, dan bersifat spesifik terhadap materi pembelajaran mata kuliah tersebut.
5. **Indikator penilaian** kemampuan dalam proses maupun hasil belajar mahasiswa adalah pernyataan spesifik dan terukur yang mengidentifikasi kemampuan atau kinerja hasil belajar mahasiswa yang disertai bukti-bukti.
6. **Kriteria Penilaian** adalah patokan yang digunakan sebagai ukuran atau tolok ukur ketercapaian pembelajaran dalam penilaian berdasarkan indikator-indikator yang telah ditetapkan. Kriteria penilaian merupakan pedoman bagi penilai agar penilaian konsisten dan tidak bias. Kriteria dapat berupa kuantitatif ataupun kualitatif.
7. **Bentuk penilaian:** tes dan non-tes.
8. **Bentuk pembelajaran:** Kuliah, Responsi, Tutorial, Seminar atau yang setara, Praktikum, Praktik Studio, Praktik Bengkel, Praktik Lapangan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan/atau bentuk pembelajaran lain yang setara.
9. **Metode Pembelajaran:** Small Group Discussion, Role-Play & Simulation, Discovery Learning, Self-Directed Learning, Cooperative Learning, Collaborative Learning, Contextual Learning, Project Based Learning, dan metode lainnya yg setara.
10. **Materi Pembelajaran** adalah rincian atau uraian dari bahan kajian yg dapat disajikan dalam bentuk beberapa pokok dan sub-pokok bahasan.
11. **Bobot penilaian** adalah prosentasi penilaian terhadap setiap pencapaian sub-CPMK yang besarnya proposional dengan tingkat kesulitan pencapaian sub-CPMK tsb., dan totalnya 100%.
12. **PB=** Kegiatan Belajar Terbimbing, **PT=**Kegiatan Penugasan Terstruktur, **KM=**Kegiatan Mandiri, **P=**Praktikum.

3. Komponen Penilaian

No.	Komponen Penilaian	Bobot (%)	Deskripsi
1	Tugas Analisis Kasus	20	
2	Kuis	15	
3	UTS	25	
4	UAS	25	
5	Policy Brief	15	
	Total Bobot (%)	100	

Rekonsiliasi Bobot Komponen Penilaian dengan Bobot Sub-CPMK

Bobot komponen penilaian pada tabel di atas dan bobot Sub-CPMK merupakan dua cara pandang atas nilai akhir yang sama: penjumlahan menurut baris menghasilkan bobot Sub-CPMK, penjumlahan menurut kolom menghasilkan bobot komponen penilaian.

Sub-CPMK	Tugas Analisis Kasus	Kuis	UTS	UAS	Policy Brief	Bobot Sub-CPMK (%)
Sub-CPMK1	—	4	9	—	—	13
Sub-CPMK2	—	4	8	—	—	12
Sub-CPMK3	5	—	8	—	—	13
Sub-CPMK4	5	—	—	7	—	12
Sub-CPMK5	—	4	—	6	—	10
Sub-CPMK6	5	—	—	6	—	11
Sub-CPMK7	5	—	—	6	—	11
Sub-CPMK8	—	3	—	—	15	18
Bobot Komponen (%)	20	15	25	25	15	100

Nilai Akhir Program Sarjana — Kurikulum 2023

Nilai Akhir	Konversi	
Skala 100	Huruf	Bobot
85.00 – 100.00	A	4.00
75.00 – 84.99	B	3.00
65.00 – 74.99	C	2.00
50.00 – 64.99	D	1.00
0.00 – 49.99	E	0.00

4. Rencana Tugas

Rencana Tugas:

	UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN S1			
RENCANA TUGAS MAHASISWA				
MATA KULIAH	Studi Parlemen			
KODE	3PBIP416	sks	3	SEMESTER 4
DOSEN PENGAMPU	Swastiani Dunggio, S.IP., M.Si.			
METODE PENUGASAN				
JUDUL TUGAS				
SUB CAPAIAN PEMBELAJARAN MATA KULIAH				
DISKRIPSI TUGAS				
CAKUPAN UTAMA KERTAS KERJA (Contoh berdasarkan berbagai kasus)				

LANGKAH Pengerjaan Tugas	
Bentuk dan Format Luaran	
Indikator, Kreteria dan Bobot Penilaian	
Jadwal Pelaksanaan	
Lain-lain	
Daftar Rujukan	

5.1 Tugas Analisis Kasus

Nama Mahasiswa		NIM			
Judul Tugas		Tugas Analisis Kasus			
No	Kriteria	Skor Penilaian			
		Sangat Baik (85-100)	Baik (70-84)	Cukup (60-69)	Kurang (<60)
1	Perencanaan	Matang, realistis, terjadwal	Baik	Kurang matang	Tanpa rencana
2	Kualitas produk/luaran	Fungsional, berkualitas tinggi	Baik, sedikit kekurangan	Cukup, banyak kekurangan	Tidak berfungsi
3	Kreativitas & inovasi	Sangat orisinal & inovatif	Ada unsur inovasi	Kurang inovatif	Meniru/biasa
4	Penerapan konsep keilmuan	Konsep tepat & mendalam	Tepat	Sebagian keliru	Tidak sesuai konsep
5	Kerja tim & tanggung jawab	Kolaborasi solid, kontribusi merata	Baik	Timpang	Tidak berkontribusi
6	Presentasi hasil	Meyakinkan & jelas	Jelas	Kurang jelas	Tidak jelas

5.2 Kuis (Holistik)

Nama Mahasiswa		NIM			
Judul Tugas		Kuis			
No	Kriteria	Skor Penilaian			
		Sangat Baik (85-100)	Baik (70-84)	Cukup (60-69)	Kurang (<60)
1	Pemahaman konsep	Tepat & menyeluruh	Tepat	Sebagian keliru	Salah paham
2	Ketepatan jawaban/argumen	Tepat & didukung alasan kuat	Tepat	Kurang tepat	Tidak tepat
3	Kelengkapan	Menjawab seluruh tuntutan soal	Hampir lengkap	Sebagian	Tidak lengkap
4	Struktur & logika	Runtut & koheren	Runtut	Kurang runtut	Kacau
5	Bahasa	Jelas, baku, efektif	Jelas	Kurang jelas	Sulit dipahami

5.3 UTS (Holistik)

Nama Mahasiswa		NIM			
Judul Tugas		UTS			
No	Kriteria	Skor Penilaian			
		Sangat Baik (85-100)	Baik (70-84)	Cukup (60-69)	Kurang (<60)
1	Pemahaman konsep	Tepat & menyeluruh	Tepat	Sebagian keliru	Salah paham
2	Ketepatan jawaban/argumen	Tepat & didukung alasan kuat	Tepat	Kurang tepat	Tidak tepat
3	Kelengkapan	Menjawab seluruh tuntutan soal	Hampir lengkap	Sebagian	Tidak lengkap
4	Struktur & logika	Runtut & koheren	Runtut	Kurang runtut	Kacau
5	Bahasa	Jelas, baku, efektif	Jelas	Kurang jelas	Sulit dipahami

5.4 UAS (Holistik)

Nama Mahasiswa		NIM			
Judul Tugas		UAS			
No	Kriteria	Skor Penilaian			

		Sangat Baik (85-100)	Baik (70-84)	Cukup (60-69)	Kurang (<60)
1	Pemahaman konsep	Tepat & menyeluruh	Tepat	Sebagian keliru	Salah paham
2	Ketepatan jawaban/argumen	Tepat & didukung alasan kuat	Tepat	Kurang tepat	Tidak tepat
3	Kelengkapan	Menjawab seluruh tuntutan soal	Hampir lengkap	Sebagian	Tidak lengkap
4	Struktur & logika	Runtut & koheren	Runtut	Kurang runtut	Kacau
5	Bahasa	Jelas, baku, efektif	Jelas	Kurang jelas	Sulit dipahami

5.5 Policy Brief

Nama Mahasiswa		NIM			
Judul Tugas		Policy Brief			
No	Kriteria	Skor Penilaian			
		Sangat Baik (85-100)	Baik (70-84)	Cukup (60-69)	Kurang (<60)
1	Rumusan masalah	Tajam, relevan, terfokus	Jelas	Kurang fokus	Tidak jelas
2	Kedalaman kajian & referensi	Kaya, mutakhir, relevan	Memadai	Terbatas	Minim/usang
3	Analisis & argumentasi	Kritis, logis, didukung bukti	Logis	Dangkal	Tidak logis
4	Sistematika penulisan	Terstruktur baku & koheren	Terstruktur	Kurang runtut	Berantakan
5	Tata tulis & sitasi	Baku, sitasi konsisten	Sedikit kesalahan	Banyak kesalahan	Tidak baku

6. Norma Akademik

1. Kehadiran minimal 75% dari total pertemuan menjadi syarat mengikuti UAS.
2. Toleransi keterlambatan masuk kelas 15 menit; lewat itu dianggap tidak hadir pada sesi tsb kecuali ada izin dosen.
3. Tugas dikumpulkan via LMS sesuai tenggat yang ditetapkan; keterlambatan dikenakan pengurangan nilai sesuai kebijakan dosen pengampu.
4. Integritas akademik ditegakkan penuh -- plagiarisme, joki, atau pemalsuan data/karya dikenakan sanksi akademik sesuai Pedoman Akademik UNISAN.
5. Pemanfaatan Generative AI (GenAI) wajib disitasi sesuai format yang ditetapkan; dilarang dipakai saat UTS/UAS/kuis kecuali diizinkan eksplisit oleh dosen.
6. Gawai (ponsel/laptop) disenyapkan selama perkuliahan, dipakai hanya untuk keperluan pembelajaran atas izin dosen.
7. Kerahasiaan data narasumber/subjek penelitian dijaga sesuai UU No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (PDP).
8. Komunikasi dosen-mahasiswa dilakukan melalui kanal resmi (LMS/email institusi), bukan kanal pribadi.